

## **KARTEL POLITIK DI KOTA MAKASSAR**



### **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Ilmu Politik Pada Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

**Oleh:**

**NURHIDAYAH PATADUNGAN**

**E 111 11 009**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU POLITIK PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**Kartel Politik Di Kota Makassar**

Disusun dan diajukan oleh

**NURHIDAYAH PATADUNGAN**

**E111 11 009**

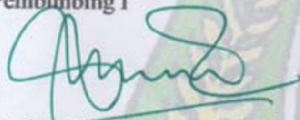
Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal 23 November 2015

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

**Menyetujui,**

Pembimbing I



Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si  
NIP 196511091991031009

Pembimbing II



A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si  
NIP 19801114200812003

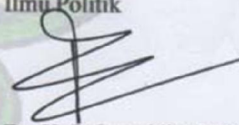
**Mengetahui,**

Ketua Departemen Ilmu Politik Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. A. Syamsu Alam, M.Si  
NIP 19641231 198903 1 027

Plt. Ketua Program Studi  
Ilmu Politik



Dr. H. Baharuddin, M.Si  
NIP 195701021985031004

## LEMBAR PENERIMAAN TIM EVALUASI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Evaluasi Skripsi  
Pada Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin

Oleh :

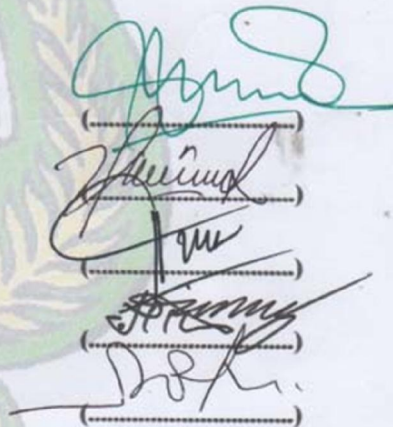
**NAMA** : NURIHDAYAH PATADUNGAN  
**NIM** : E111 11 009  
**JUDUL** : KARTEL POLITIK DI KOTA MAKASSAR

Pada :

**Hari/Tanggal** : Senin / 23 November 2015  
**Tempat** : Ruang Ujian Ilmu Politik Lt.2 Fisip UNHAS

### TIM EVALUASI SKRIPSI

**Ketua** : Prof Dr. Armin Arsyad, M.Si  
**Sekretaris** : A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si  
**Anggota** : Dr. Gustiana A. Kambo, S.Ip, M.Si  
Dr. Jayadi, M.Si  
A. Naharuddin, S.Ip, M.Si



( )  
( )  
( )  
( )  
( )



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang senantiasa tercurah kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Skripsi dengan judul “Kartel Politik Di Kota Makassar” ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta dan saudara – saudaraku yang senantiasa memberikan dukungan kasih sayang, doa, dan nasehat sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. A. Alimuddin Unde, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Dr.H. Andi Syamsu Alam, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, serta Bapak A. Nahrudin, S.Ip, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan.



4. Bapak Dr. H. Baharuddin M.Si selaku Pelaksana Tugas Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku pembimbing I dan bapak A. Ali Armunanto, S.Ip, M.Si. selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Prof. Dr. Muhammad, S.Ip, M.Si selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing disaat perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan banyak pengetahuan berharga kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fisip Unhas yang telah memberikan banyak bantuan selama menjadi mahasiswa Fisip Unhas.
9. Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar yang telah menyediakan data yang dibutuhkan penulis.
10. Seluruh Informan yang telah memberikan informasi untuk kelancaran skripsi ini.
11. Teman – teman angkatan Integritas 2011 yang selalu menjadi teman dalam yang mendukung perkuliahan penulis.
12. Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Fisip Unhas yang banyak membantu dalam proses memahami lingkungan perkuliahan.

Penulis telah berupaya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun tata bahasa, maka sangat diharapkan kritik dan saran terhadap skripsi ini agar di kemudian hari penulis dapat membuat karya tulis yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

Makassar, 4 November 2015

Nurhidayah Patadungan



## **Abstrak**

**Nurhidayah Patadungan, Nomor Pokok E111 11 009, dengan judul “Kartel Politik Di Kota Makassar”. Dibimbing Oleh Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku pembimbing I dan A. Ali Armunanto selaku pembimbing II.**

Kartel Politik merupakan suatu jaringan yang tercipta di kalangan elit yang bertujuan untuk mengontrol arah kebijakan sehingga dapat memberi insentif pada jaringan tersebut. Jaringan – Jaringan terbentuk diantara Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif serta pengusaha bahkan sampai kepada tokoh – tokoh masyarakat. Dalam Kartel Politik tercipta Inklusi dikalangan anggota kartel dan tercipta eksklusif di luar anggota kartel yang pada akhirnya akan merugikan massa rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kartel politik yang tercipta Di Kota Makassar serta implikasinya terhadap kekuasaan Walikota. Penulis juga melakukan penelitian fenomenologi dengan dasar penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap memahami kartel politik Di Kota Makassar dan Implikasinya terhadap kekuasaan Walikota. Penelitian ini juga menggunakan sumber lain dari jurnal, internet, buku, penelitian sebelumnya dan data dari pihak terkait.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Di Kota Makassar Kartel tercipta diantara Walikota, DPRD, Birokrasi, Pengusaha, Media dan tokoh – tokoh masyarakat. Mereka bersama – sama menggunakan kebijakan sebagai objek dalam memenuhi kepentingan kolektif mereka. Di Kota Makassar insentif kekuasaan oleh kartel tersebut menggunakan kekuasaan insentif diantara anggota kartel. Legitimasi yang diperoleh Walikota akan memberikan insentif kepada pengusaha dan birokrasinya sehingga dapat menciptakan loyalitas dari anggota kartel kepada Walikota.



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Abstraksi .....	v
Daftar Isi .....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Politik Kartel .....	11
B. Konsep Politik Insentif .....	19
C. Teori Pertukaran Jaringan .....	27
C. Kekuasaan Struktural .....	28
C. Struktur Kekuasaan yang Kuat dan Lemah .....	29
D. Kerangka Pemikiran .....	30

### BAB III : METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian .....	32
B. Tipe dan Dasar Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Teknik Analisis Data .....	35

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kota Makassar .....	38
A.1 Konstalasi Politik Lokal Kota Makassar.....	39
A.2 Sektor Ekonomi Dominan Di Kota Makassar.....	44
A.3 Aktor Politik dan Bisnis Kota Makassar.....	46
A.4 Kebijakan Di Kota Makassar .....	63
A.5 Visi Misi Kota Makassar.....	69

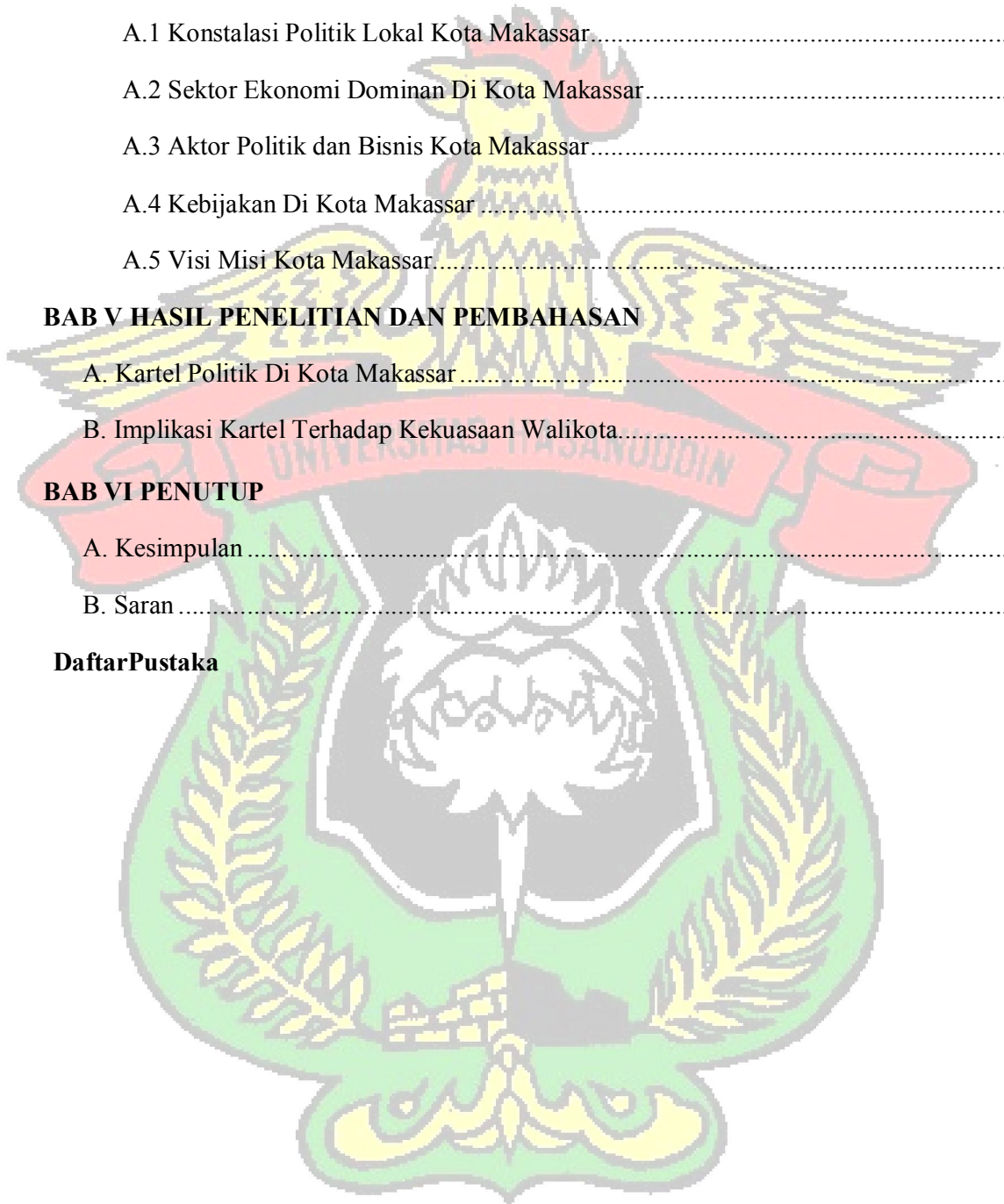
#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kartel Politik Di Kota Makassar .....	74
B. Implikasi Kartel Terhadap Kekuasaan Walikota.....	100

#### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	109

#### **DaftarPustaka**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Politik indonesia pasca reformasi masih banyak di pengaruhi oleh politik pada masa orde baru. Runtuhnya kekuasaan orde baru hanya menghilangkan Soeharto saja sedangkan struktur pendukungnya masih utuh dan mampu bertahan dalam sistem politik indonesia kekinian. Kompetisi kepentingan dan kekuasaan, terutama untuk mengakses sumber daya publik menjadi karakteristik dasar dalam proses demokrasi bagi politik indonesia. Pada masa orde baru penguasaan atas sumber daya publik dilakukan dengan cara - cara kekerasan dan ditandai dengan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia, maka kini penguasaan sumber daya publik dilakukan dengan cara – cara yang demokratis, tanpa kekerasan dan dengan cara yang tidak melanggar hukum.

Kondisi politik indonesia telah melahirkan konsep baru yaitu politik kartel. Dalam ranah politik pada umumnya beberapa tulisan menggambarkan terciptanya kartel politik terlihat dalam sistem multi partai yang tercipta selepas orde baru. Partai – partai politik melakukan persaingan dalam menguasai sumber – sumber daya publik yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi dan kepentingan dari partai – partai tersebut.

Kepentingan partai – partai untuk menjaga kelangsungan hidup kolektif mengharuskan mereka membentuk kartel. Dengan demikian, kelangsungan hidup mereka ditentukan oleh kepentingan bersama untuk menjaga berbagai sumber keuangan yang ada terutama yang berasal dari pemerintah. Pada titik



ini, sumber keuangan partai yang dimaksud bukanlah uang pemerintah yang resmi dialokasikan untuk partai politik, melainkan uang pemerintah yang di dapatkan oleh partai melalui perburuan rente (*rent-seeking*). Perburuan rente tercipta karena tingginya *cost politic* yang harus dikeluarkan partai dalam proses demokrasi. Aktivitas ini hanya di mungkinkan jika kader atau elit partai dari mereka memiliki akses dalam jabatan pemerintahan dan parlemen. Namun dalam perspektif berbeda bukan hanya persaingan yang tercipta dalam proses demokrasi namun koalisi pun bisa tercipta jika mereka mempunyai kepentingan yang sama meskipun landasan ideologis partai mereka jelas berbeda. Dalam ranah politik teman bisa menjadi lawan dan begitupun sebaliknya selama mereka bisa saling mendukung untuk mencapai tujuan mereka.

Perkembangan politik menunjukkan dengan terang benderang berbagai konflik dan perbedaan dalam koalisi tidak memunculkan keinginan bagi sebagian partai politik untuk keluar dari koalisi karena penguasaan atas jabatan publik dan kementerian pemerintah lebih penting dari pada perbedaan ideologi, orientasi dan sikap partai.

Konsep kartel politik partai tersebut tidak hanya berhenti dalam konteks partai politik saja namun hal tersebut pun tercipta dalam kompetisi elit politik. Oligarki telah mebahak demokrasi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Dengan penguasaan atas sumber – sumber kekuasaan mereka mampu menentukan arah dan kecenderungan politik masyarakat.

Karakteristik kartel politik Di Indonesia yaitu Pertama, kartel sangat menekankan pragmatisme, sikap dan pilihan politik diambil berdasarkan kalkulasi untung rugi secara finansial, terutama untuk menjamin logistik untuk kepentingan politik. Kedua, kaburnya batas antara partai yang memerintah dan partai oposisi. Ketiga, kartel politik adalah sistem kolusif yang mengabaikan massa-rakyat.<sup>1</sup>

Kartel politik oleh elit politik indonesia saat ini tidak berbeda jauh dengan elit politik masa orde baru bahkan oligarki yang dibangun dan dibesarkan sejak masa orde baru mampu bertahan dan beradaptasi dengan sistem politik dan ekonomi baru. Oligarki ini adalah aliansi sosial yang cair dan luas dari kekuasaan birokrasi, korporasi yang diuntungkan oleh berbagai kebijakan protektif dan fasilitas pemerintah serta organisasi korporatif yang menopang kekuasaan orde baru. Krisis ekonomi dan politik serta berbagai program reformasi meskipun membuat oligarki melemah dan terfragmentasi, tetapi tidak menghancurkan basis sosial.<sup>2</sup>

Basis sosial yang terdesentralisasi dari masa orde baru tersebut masih bertahan sampai sekerang hal tersebut terlihat jelas dalam ranah politik lokal indonesia. Hadirnya penguasa – penguasa lokal dalam pilkada pasca reformasi telah memberikan warna tersendiri dalam proses demokrasi yang terjadi ditingkat lokal. Kehadiran mereka dianggap dapat menciderai proses demokrasi yang sedang berlangsung. Kondisi demikian menjadikan penguasa – penguasa lokal dalam pilkada selalu disegmentasi sebagai hal yang negatif.

---

<sup>1</sup> J. Danang Widiyokso. *Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia : strategi memutus oligarki dan reproduksi korupsi politik*, (Malang : Intrans Publishing, 2013), hlm.9

<sup>2</sup> Robinson, Hadiz. 2004.

Asumsi ini didasarkan pada maraknya praktik perburuan rente dan korupsi yang dilakukan oleh penguasa – penguasa lokal melalui kontrolnya terhadap proses pengelolaan pemerintahan daerah, termasuk *economical resources* yang ada di daerah. Kehadiran mereka dalam pilkada merupakan upaya mereka untuk menjamin alokasi *political resources* dan *economical resources* daerah agar tetap berjalan sesuai dengan alur yang mereka inginkan. Upaya menciptakan kontrol sosial untuk menguasai alokasi sumber daya ini mereka lakukan dengan cara menempatkan anggota keluarga, kroni – kroninya dalam jabatan strategis atau bahkan menemptakan dirinya sendiri dalam jabatan tertinggi yang ada di daerah.

Berhasilnya elit - elit lokal dalam menguasai sumber – sumber kekuasaan yaitu jabatan – jabatan penting dan memiliki pengaruh yang besar atas masyarakat hingga dapat dikatakan melebihi para pemimpin negara dan para birokrat lokal, dikarenakan oleh terciptanya struktur masyarakat yang mirip jaringan. Struktur ini telah terbentuk sejak pemerintahan kolonial dan berlangsung kedalam perekonomian kapitalis dan kelas – kelas pemilik tanah besar. Kemampuan mereka untuk melakukan kontrol sosial dilakukan dengan cara menempatkan diri sebagai “penolong” bagi masyarakat di wilayahnya atau dengan kata lain mereka menciptakan relasi patron – klien sehingga legitimasi dan dukungan dari masyarakat dalam proses politik bukan hal yang mustahil mereka dapatkan.

Kemampuan penguasa – penguasa lokal tersebut untuk mempertahankan dan memperbesar kekuasaan mereka tidak terlepas dari strategi politik



insentif (*Political Incentive*) yang mampu mereka ciptakan. Politik insentif yang mereka ciptkan telah memberikan surplus dalam setiap proses politik yang mereka lakukan karena menghasilkan orang – orang atau instansi yang mau melakukan apapun yang mereka inginkan dengan memberikan janji “balas budi”. Kekuasaan imbalan yang di berikan oleh penguasa – penguasa lokal tersebut tidak lain untuk mendukung kekuasaan legitimasi yang mereka ingin ciptakan. Atau dengan kata lain mereka telah menempatkan orang – orang kepercayaan mereka dalam setiap lapisan masyarakat yang berfungsi sebagai informan dan penyempurna setiap isu yang ingin di ciptakan oleh elit tersebut.

Kekuasaan insetif (*Incentive Power*) yang dimiliki elit akan menghasilkan kartelisasi kekuasaan jika insentif di ciptakan di kalangan pemilik modal, maka yang terjadi adalah elit lokal atau penguasa lokal akan semakin kokoh dimana mereka akan mendapatkan *economical resources* untuk membiayai proses politik dalam mendapatkan jabatan – jabatan politik yang semakin mahal. *Cost politic* yang harus elit politik keluarkan sangat besar dalam setiap proses politik. Pemilukada merupakan wujud dari demokrasi langsung yang menciptakan *cost politic* yang membuat calon pemimpin daerah tersebut harus melakukan *rent-seeking* karena pragmatisme masyarakat yang mulai berkembang. Hasilnya mereka telah membuat kontrak dengan pemilik modal yang harus dipenuhi setelah mereka medapatkan jabatan politik tersebut. Kartelisasi kekuasaan yang dilakukan oleh elit politik pada akhirnya akan berdampak pada massa-rakyat.

Sesuai permasalahan diatas penulis mencoba mengelaborasi salah satu bentuk fenomena kartel politik yang ada Di Sulawesi Selatan tepatnya Di Kota Makassar yaitu bagaimana timbulnya kartel politik di diantara elit penguasa, birokrasi, partai politik dan pengusaha.

Kota Makassar sebagai pusat pemerintahan dan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan telah menjadikan kota makassar sebagai pusat berkembangnya kartel politik. Desentralisasi di era demokrasi telah menciptakan persaingan yang ketat di antara elit – elit lokal untuk bisa menjadi yang paling berkuasa dalam hal ini penulis melihat deliberasi yang di lakukan elit – elit Di Kota Makassar bertujuan untuk mendapatkan legitimasi untuk menguasai pemerintahan dan alur kebijakan daerah daerah.

Kebijakan – kebijakan yang paling banyak melibatkan elit Di Kota Makassar adalah Kebijakan tentang Revitalisasi Lapangan Karebosi dan Reklamasi Pantai Losari. Proyek pemerintah ini merupakan proyek yang banyak menuai sorotan dari masyarakat karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh banyak pihak di dalamnya. Kebijakan – kebijakan inilah yang banyak terindikasi bahwa akan melahirkan suatu jaringan – jaringan yang berusaha untuk mengontrol arah dari kebijakan tersebut yang tentunya akan menjamin kepentingan kolektif mereka.

Walikota dalam posisinya sebagai pemimpin daerah kota memiliki hak prerogatif untuk menentukan birokrat – birokrat dan arah kebijakan di daerahnya. Dalam hal ini birokrasi merupakan kekuatan politik bagi setiap kepala daerah karena peran dan fungsi mereka yang terspesifik menyebabkan

praktisi birokrasi memiliki posisi dan struktur yang dekat dengan masyarakat. Peran birokrat tidak hanya terbatas pada sektor suprastruktur politik. Birokrasi setidaknya memiliki 4 tugas yakni peran dalam proses input, peran dalam proses legislatif, peran sebagai penterjemah kebijakan politik, dan sebagai pelaksana eksekutur kebijakan politik. Peran dan fungsi birokrasi tersebut menuntut setiap kepala daerah untuk memilih orang – orang yang menempati jabatan birokratik tersebut yang mampu untuk menjaga stabilitas hubungan kepala daerah dengan masyarakat yang di pimpinnya.

Seperti halnya kepemimpinan Ilham Arif Sirajuddin selama 2 periode telah memberinya kekuatan dan kesempatan untuk membentuk para birokrat sebagai karakter yang sangat loyal antara pimpinan dan bawahan, sehingga mutasi dilakukan sebelum pemilihan walikota merupakan sanksi awal yang diberikan Ilham Arif Sirajuddin untuk memposisikan kliennya yang memperlihatkan perannya sebagai bukan klien darinya akan dimutasi terlebih dahulu sebelum momentum pemilihan walikota dan setelah pemilihan walikota. Oknum – oknum yang menjabat selaku camat dan lurah di daerahnya masing – masing yang tidak memenangkan kandidat Danny Pamanto dan Syamsul Rizal maka ia akan ikut tersingkir pula oleh mutasi.

Insentif kekuasaan oleh elit – elit politik yang memiliki basis politik kuat di daerah dilakukan dengan menggunakan *insentif power*. Elit politik yang telah atau akan menduduki posisi kepala daerah membutuhkan basis massa yang kuat. Massa tersebut dapat mereka peroleh dengan menempatkan atau mengendalikan orang – orang paling berpengaruh di wilayah – wilayah



tertentu yang kemudian menjadi *broker* untuk memperoleh suara dalam PILKADA di beberapa daerah sulawesi selatan.

Kartel politik di kota makassar tidak berhenti sampai disitu penulis kemudian melihat asal muasal terbentuknya elit – elit besar di mulai dari oligarki yang tercipta dalam tubuh partai politik dimana elit – elit yang memiliki sumber daya kemudian mampu menjadi pemimpin partai. Keadaan tersebut menciptakan mudahnya perekrutan kader dalam tubuh partai selama calon anggota kader mampu menjadi alat dalam memperbesar pengaruh partai.

Elit – elit politik, Birokrat, partai politik dan pengusaha Di Kota Makassar kemudian sama – sama menguasai sumber daya publik untuk kepentingan mereka masing – masing. Ironisnya kenyataan tersebut yang paling di rugikan adalah massa-rakyat sendiri. Praktek kartel yang mereka ciptakan akan mengamankan insentif kekuasaan yang berusaha mereka bangun sehingga mampu bertahan di sistem demokrasi.

Demokrasi telah mendukung bertahannya kartel yang di tandai dengan kuatnya pengaruh uang dan kekuasaan. Politik kita pun tersandera oleh mereka yang kuat yang dengan uangnya mereka melanggengkan kekuasaannya. Seperti yang di katakan oleh Rocky Gerung pengajar filsafat UI yaitu indonesia punya instalasi demokrasi yang lengkap yaitu partai, DPR, dan Mahkamah tapi yang mengalir di dalamnya instalasi itu adalah air kotor korupsi, air kotor kartel, dan sogok menyogok maka pemilu itu seperti pompa air, terlihat bagus tapi yang keluar itu “cacing – cacing”.

Melihat berbagai penjelasan diatas yang mengelaborasi bagaimana kartel tercipta di kalangan elit – elit politik, birokrasi, partai politik dan pengusaha di kota makassar sehingga mampu menguasai sumber – sumber daya publik Di Sulawesi Selatan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, kajian dan penulisan skripsi dengan judul “ **KARTEL POLITIK DI KOTA MAKASSAR**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang menyangkut persoalan kartel politik Di Kota Makassar maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. **Bagaimana Kartel Politik Di Kota Makassar?**
2. **Apa Implikasi Kartel Terhadap Kekuasaan Walikota Makassar?**

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengelaborasi dan menganalisis kartel Di Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis implikasi kartel terhadap kekuasaan walikota makassar.

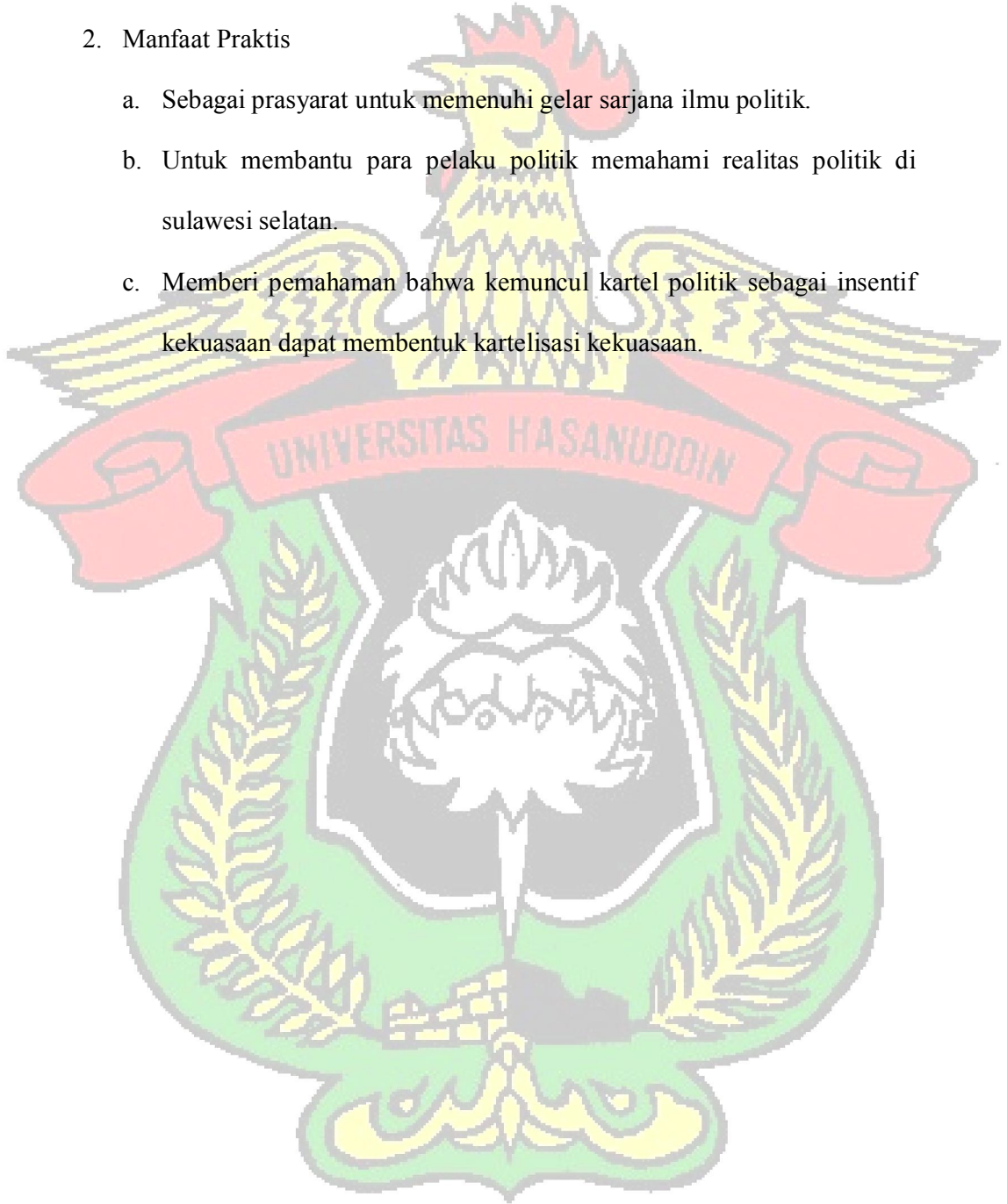
#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademik
  - a. Mendorong munculnya penelitian baru dalam bidang ini, sehingga studi ilmu politik dapat selalu menyesuaikan perkembangan dan kegunaan ilmu pengetahuan
  - b. Menjawab fenomena sosial politik yang ada.
  - c. Menunjukkan secara ilmiah kartel politik Di Kota Makassar.

- d. Memperkaya khazanah kajian ilmu politik dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai prasyarat untuk memenuhi gelar sarjana ilmu politik.
- b. Untuk membantu para pelaku politik memahami realitas politik di sulawesi selatan.
- c. Memberi pemahaman bahwa kemunculan kartel politik sebagai insentif kekuasaan dapat membentuk kartelisasi kekuasaan.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan beberapa aspek yang akan memudahkan pembaca memahami penelitian. Aspek – aspek tersebut yaitu, konsep politik kartel, konsep politik insentif, Teori Pertukaran Jaringan, dan kerangka pemikiran.

#### A. Konsep Politik Kartel

Konsep politik kartel dipinjam dari teori kartel yang berlaku di dunia ekonomi, dimana intinya adalah untuk meminimalkan persaingan, mengontrol harga, dan memaksimalkan keuntungan di antara para anggota kartel. Ketika di terapkan di lapangan politik, teori kartel ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik agar tidak terjadi guncangan dan perpecahan akibat persaingan diantara sesama elit dalam memperebutkan jabatan – jabatan politik dan sumber daya ekononmi strategis di era demokrasi. Seperti ditulis Antonius Made Tony Supriatma dalam essainya yang berjudul “Politik Indonesia : bergerak Ke-arrah Kartel?” yaitu politik kartel muncul dari sebuah koalisi besar dari para elit politik. Sistem ini di ciptakan untuk meminimalkan kerugian dari pihak yang kalah, entah dalam pemilihan umum atau dalam koalisi. Berbeda dengan sistem otoriterisme – birokratik yang memakai sistem penyingkiran (*exlusionary*) terutama dari elemen – elemen radikal dan populis dari rakyat, kartel lebih mengutamakan mekanisme perangkulan (*incorporation*) dari elit yang memiliki latar belakang ideologis yang berbeda. Dengan terjadinya politik kartel ini, maka yang paling dirugikan tentu saja adalah massa-rakyat.

Katz dan mair, 1995:19; bdk. Montero dan Gunther 2002: 3-8; Kirchheimer 1966a dan 1966b; Puhle 2002:59 -60. Mengidentifikasi :

“Pada masa partai elit dominan, persaingan politik umumnya berkisar pada elite yang hak politiknya diperoleh turun – temurun, dan mereka bersaing untuk merebut pendukung [yang tak memiliki kesempatan untuk dipilih]. Ketika tipe baru partai massa berkembang, persaingan antar partai bergeser ke isu reformasi sosial (atau menentang reformasi sosial). Dan partai saling bersaing berdasarkan kemampuannya mewakili segmen tertentu di masyarakat. Dengan munculnya partai lintas – kelompok, tujuan partai politik umumnya tetap menentukan namun isu persaingan bukan lagi mengenai reformasi tatanan sosial, melainkan mulai bergeser pada penyempurnaan sosial tatanan sosial katimbang reformasi radikal dan menyeluruh. Partai tidak lagi mewakili kepentingan segmen – segmen utama di masyarakat eksklusif, melainkan lebih mengutamakan efektivitas mereka dalam membuat kebijakan dan lebih pragmatis. Terakhir, dengan munculnya partai kartel mulailah satu periode di mana partai lebih mengurus kepentingan sendiri dan politik menjadi profesi dalam dirinya.”<sup>3</sup>

Kartelisasi dapat dilihat sebagai lawan persaingan, dan bisa didefinisikan sebagai situasi dimana partai politik melepaskan berbagai perbedaan ideologis dan pragmatis mereka demi sesuatu yang lain. Dan situasi ini dimungkinkan menurut kartz dan mair, karena semua partai besar memiliki

---

<sup>3</sup> Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel : Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), hlm. 17

kepentingan yang sama, yakni memelihara kelangsungan hidup kolektif mereka (1995 : 5). Batas ideologis diantara partai – partai menjadi kabur, dan ideologi tidak lagi menjadi penentu perilaku partai. Akibatnya oposisi tidak bisa dikenali lagi.<sup>4</sup>

Allih – alih mewakili kepentingan kolektif yang beragam, dalam sistem kepartaian yang terkartelisasi, sebagian besar partai politik jika tidak semuanya, cenderung melayani kepentingan mereka sendiri sebagai kelompok yang relatif otonom. Sebagaimana dikemukakan oleh Katz dan Mair, sistem kepartaian yang terkartelisasi juga ditandai oleh terpisahnya pemimpin partai dengan konstituen mereka dan terpinggirnnya para oposan di tubuh partai (Mair dan Katz 1995; lihat juga Kitschelt 2000, dan Yishai 2001).<sup>5</sup>

Supriatma (2009) menggambarkan karakteristik politik kartel di Indonesia. Pertama, kartel sangat menekankan pragmatisme. Sikap dan pilihan politik diambil berdasarkan kalkulasi untung rugi secara finansial, terutama untuk menjamin logistik bagi kepentingan politik. Dalam kartel politik, semua pihak ingin bersama – sama untuk mendominasi dan mengontrol sumber daya publik. Oleh karena itu tidak ada pertimbangan dan perbedaan ideologis antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lain. Yang menyatukan mereka adalah kebutuhan besar untuk mendapatkan dana – dana

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 19

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 20



politik dan kebutuhan, ini jauh lebih penting daripada perbedaan politik dan sikap politik.<sup>6</sup>

Karakteristik kedua, kaburnya batas antara partai yang memerintah dan partai oposisi. Praktis partai politik yang tidak termasuk dalam koalisi tidak berarti memilih untuk menjadi oposisi. Bisa jadi itu hanya soal menunggu waktu dan giliran untuk sama – sama masuk dalam pemerintahan. Perkembangan politik pada 2011 lalu menunjukkan ada keinginan dari partai Gerindra untuk masuk ke dalam pemerintahan bergabung dengan partai Demokrat SBY. Fakta bahwa Prabowo adalah rival SBY dalam Pilpres 2009 tidak mengendurkan upaya untuk sama – sama memerintah dan mengakses sumber daya publik. Memang akhirnya keputusan Gerindra masuk ke dalam pemerintahan batal, seperti halnya dalam politik tidak ada lawan dan musuh yang abadi namun yang abadi adalah kepentingan, tampak jelas dari fenomena tersebut. Hal serupa juga terjadi dengan PDI-P. Meskipun Megawati bertahan untuk memilih sebagai oposisi, faktanya lingkaran elit PDI-P terpecah karena suaminya Taufik Kiemas dan anaknya, Puan Maharani yang kabarnya adalah Putri Mahkota PDI-P, menunjukkan keinginan untuk bergabung dengan koalisi.<sup>7</sup>

Karakteristik ketiga, kartel politik adalah sistem kolusif yang mengabaikan massa-rakyat. dalam kartel politik, dilevel elit yang terjadi adalah inklusi atau saling mengakomodasi sedangkan bagi rakyat adalah eksklusif atau pengabaian. Di dalam kartel politik, partai politik tidak merasa perlu

---

<sup>6</sup> J. Danang Widiyokso, *Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia : Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik*, (Malang : Intrans Publishing, 2013), hlm. 9

<sup>7</sup> Ibid, hlm.9

mendengarkan apa kata rakyat, bahkan kalau perlu diabaikan sepanjang mereka bisa menikmati kekuasaan bersama partai lainnya. Kecenderungan ini tampak dalam berbagai kasus yang berdimensi publik, tidak muncul protes atau gerakan perlawanan dari partai politik. Seperti kasus lumpur lapind, yang protes hanya korban dan sejumlah LSM sementara partai politik tidak menunjukkan sikap yang jelas dalam tragedi tersebut. Juga berbagai upaya pelemahan KPK, justru mendapatkan dukungan dari partai politik. Tidak ada sikap yang jelas dan tegas dari partai – partai politik untuk mendukung keberadaan KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>8</sup>

Teori lama tentang oligarki dikemukakan oleh sosiolog Robert Michles. Menurut Michles, demokrasi gagal menghentikan kecenderungan oligarkis untuk muncul kepermukaan. Apalagi dalam sistem demokrasi prosedural dimana faktor kelembagaan (organisasi) menempati kedudukan yang sentral. Bagi Michels, dinamika organisasi selalu ditentukan oleh faktor intelektualitas, finansial, dan kepemimpinan. Dari ketiga faktor ini selalu direpresentasikan oleh elit, bukan oleh massa dengan kemampuan yang beragam, yang menyebabkan organisasi tersebut jatuh dalam kekuasaan oligarki. Kata Michels (1959) :

*“adalah organisasi yang menyebabkan lahirnya kedaulatan para wakil atas pemilih, kedaulatan para penerima mandat atas pemberi mandat, dan kedaulatan para delegasi atas pemberi delegasi. Siapa yang bicara organisasi, bicara oligarki.”*

Umumnya analisis Michels lebih di tujukan pada internal organisasi, ketimbang hubungan antar organisasi. Baginya organisasi adalah pertarungan

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 10

tanpa henti antara kepentingan massa dengan kepentingan elit. Namun, studi mutakhir demokrasi menunjukkan, oligarki tidak hanya terjadi di internal partai tapi juga diantara partai yang berkuasa. Studi adam Przeworski dalam bukunya *Sustainable Democracy* (1999), memperlihatkan bahwa kontrol terhadap dominasi politik dilakukan melalui birokrasi oligarki untuk menjadikan partai sekadar mesin pendulang suara pemilih dan konstituennya. Birokrasi oligarki ini membentuk kartel yang berkewajiban untuk menentang para pesaingnya sekaligus membatasi kompetisi, menghalangi akses, dan mendistribusikan keuntungan kekuasaan politik diantara para anggota kartel. Mereka inilah yang kemudian menciptakan bahaya bagi demokrasi karena menjadikan sebagai proyek individual beberapa pemimpin partai politik dan asosiasi – asosiasi korporatisnya yang menghasilkan keuntungan bagi mereka dan melindungi uangnya dari pihak luar.

Perkembangan kartel politik di tingkat lokal di dukung oleh desentralisasi yang telah mengubah wajah politik indonesia menjadi sangat berbeda dari yang pernah ada dalam sejarah. Pada awalnya desentralisasi dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ditingkat lokal. Kehadirannya di sokong oleh lembaga – lembaga multinasional seperti *World Bank* dan *International Monetary Fund* (IMF). Bahkan *World Bank* menyatakan bahwa desentralisasi adalah “*The Big Bang* (Ledakan Besar)” dalam politik indonesia. (Bert Hofman dan Kai Kaiser; 2002).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Esei Antonius Made Tony Supriatma, *Politik Indonesia Bergerak Kearah Kartel*. (Academia. Edu)



Pada jaman orde baru semua kepala – kepala daerah baik Gubernur, Bupati, ataupun Walikota diangkat dengan persetujuan Jakarta. Berdasarkan pengalaman tahun 1950-an pemerintahan Soeharto sangat sadar akan potensi pergolakan daerah. Akibatnya, Soeharto mengontrol daerah dengan sangat ketat dengan tidak membiarkan personel – personel militer atau birokrasi bercokol terlalu lama di daerah. Namun kebijakan ini berubah di tahun 1980-an ketika semakin banyak perwira militer yang dikaryakan. Kebanyakan dari mereka adalah perwira – perwira menengah yang tidak mendapat karir di pusat. Dari kekuasaan politik ini mereka merambah ke bisnis dan menjalin ikatan (seringkali lewat perkawinan) dengan elit – elit lokal. Pada masa orde baru politik lokal dikuasai oleh lingkaran konsesi (*concession circle*) . Ini adalah trinitas kekuatan antara Golkar, birokrat lokal, dan elit bisnis lokal. militer dalam hal ini menjadi pengawas yang memberangkus setiap usaha yang ingin mengkritisi lingkaran konsesi ini. Semuanya ini berubah setelah orde baru runtuh. Dalam periode 1999-2004, di daerah – daerah jawa, misalnya, lingkaran konsesi baru terbentuk dengan PDI-P menggantikan Golkar. Akibatnya militer harus berkoalisi dengan PDI-P demi menghindari tuntutan massa radikal atas isu – isu seperti perampasan tanah, pembunuhan tahun 1965, dan lain sebagainya.

Elit – elit lokal bermunculan dengan kekuatan yang jauh lebih besar ketimbang pada jaman orde baru. Pemisahan Golkar dan militer mengakibatkan meningkatnya pengaruh politik pemimpin komunal seperti para kiai di ranah politik formal. Dalam beberapa hal politik kartel bekerja di

tingkat lokal. Dalam pemilihan kepala daerah langsung, dibanyak tempat proses pencalonan kepala daerah diwarnai oleh praktek persekongkolan antara partai dan kalangan bisnis lokal. Para pengusaha dapat mengamankan bisnisnya lewat politik berharap mendapatkan “perahu”, yakni menjadikan partai – partai sebagai alat mereka maju dalam pemilihan. Sementara partai – partai memasang tarif yang tinggi untuk menjadi “perahu” bagi kandidat ini. Ada perbedaan pandangan antara mereka yang menganggap peran partai menjadi hilang dalam pemilihan umum lokal dan digantikan oleh para individu.

Secara umum politik di daerah jauh lebih keras ketimbang politik di tingkat nasional. Politik uang dan kekerasan juga semakin mengemuka pertarungan politik lokal. aktor – aktor lokal mengandalkan agen – agen kekerasan yang secara kultural sudah ada sebelumnya atau dengan membentuk milisi – milisi baru. Namun, perlu dipertanyakan apakah para aktor kekerasan ini benar – benar dibentuk oleh para penguasa ataukah mereka semata – mata hanyalah para pengusaha yang memanfaatkan peluang karena terjadinya kompetisi dalam ruang yang bebas. Pembunuhan politik di indonesia relatif jarang terjadi. Mungkin hal ini disebabkan oleh *market value* untuk menjadi anggota parlemen atau menduduki jabatan eksekutif di indonesia belum terlalu besar dibandingkan dengan negara seperti Thailand misalnya. Memang patut dicatat bahwa pemilu langsung juga menghasilkan orang – orang kuat yang memiliki basis lokal seperti *clan* politik Yasin Limpo yang berkembang Di Sulawesi Selatan . mereka *clan* politik Yasin

Limpo telah mulai berkembang sejak tahun 1950-an dan berkembang luas Di Sulawesi Selatan. Mereka berbiak lewat militer, soksi, dan golkar.

Orang – orang kuat di daerah melakukan mobilisasi selain memperalat partai juga melalui eksploitasi atas politik etnik dan agama. Kekuatan politik etnik, misalnya jauh lebih relevan ditingkat daerah ketimbang nasional. Demikian juga hubungan darah, *clan*, dan keluarga. Inilah yang merupakan penghambat utama dari berkembangnya kompetisi di daerah.

## **B. Konsep Politik Insentif**

Dalam teori ekonomi dikenal konsep insentif. Setiap tindakan manusia atau kelompok, sederhana maupun rumit, dilakukan berdasarkan insentif yang tersedia melalui sistem dan institusi yang berlaku di lingkungannya<sup>10</sup>. Levitt dan Dubner (2005, 2007), ekonom yang mendalami teori ekonomi perilaku (*behavioural economics*), menuliskan secara populer bahwa insentif tersebut tak harus finansial atau material, ia dapat pula berwujud sosial (misalnya status sosial) dan moral (misalnya norma). Hal itu berlaku di semua aspek, termasuk politik.

Satu bagian penting dari teori insentif adalah bahwa individu-individu mengharapkan kesenangan dari pencapaiannya yang mereka sebut dengan insentif positif dan dari apa yang disebut insentif negatif (Bachtiar, 2010). Suatu insentif baik terukur atau tak terukur diberikan setelah kejadian dari satu tindakan yaitu perilaku dengan tujuan agar perilaku terjadi lagi. Studi menunjukkan jika seseorang mendapatkan imbalan dengan seketika atau

---

<sup>10</sup> Essai Martin Manurung. *Membenahi Skema Insentif Politik*. 2010



sesegera mungkin , pengaruhnya akan lebih besar dan aksi berulang menyebabkan perilaku tersebut menjadi kebiasaan.

jika ditinjau dari konsep kekuasaan maka akan tercipta kekuasaan insentif(*Insentif power*)yang menurut French dan Raven (1959) adalah kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain (pengikutnya) karena kepatuhan mereka. Kekuasaan imbalan di gunakan untuk mendukung kekuasaan legitimasi. Jika seseorang memandang imbalan, baik imbalan ekstrinsik maupun imbalan intrinsik, yang ditawarkan seseorang atau organisasi yang mungkin sekali akan diterimanya, mereka akan tanggap terhadap perintah. Penggunaan kekuasaan imbalan ini amat erat sekali kaitannya dengan teknik memodifikasi perilaku dengan menggunakan imbalan sebagai faktor pengaruh.

Setiap individu maupun kelompok masyarakat akan cenderung melakukan suatu tindakan bila mana manfaatnya bertambah bagi mereka dan sebaliknya tidak akan berbuat apapun jika tidak ada manfaatnya. Atau dengan kata lain ada pengaruh insentif dalam berperilaku. Insentif tersebut dapat berbentuk insentif moral, insentif sosial, insentif ekonomis. Insentif moral yaitu tindakan seseorang didasari dengan adanya pemahaman tentang konsep benar dan salah dari keyakinan serta nilai-nilai yang dianutnya. Insentif sosial adalah dimana suatu tindakan akan dihubungkan dengan rasa malu maupun perasaan mulia disuatu kelompok masyarakat. Insentif ekonomis adalah insentif yang menyebabkan orang akan bertindak menurut iming-iming finansial.

Setiap kebijakan dan pilihan elite politik dalam pemerintahan dalam konteks pilihan rasional, sangat dipengaruhi juga oleh motif – motif mencari keuntungan dan kemanfaatan diri dari si pelaku (elit politik), yang tidak jarang berseberangan dengan nilai – nilai reformasi demokrasi. Terjadinya tumpang tindih antara motif kepentingan pribadi dan tekanan menjalankan misi politik reformasi, disebut tepat oleh Barbara Geddes sebagai “dilemma politisi”.<sup>11</sup> Elite dalam pemerintahan tidak lepas dari dilemma semacam ini. Geddes menyatakan bahwa perilaku bernegara sebagai hasil akhir dari pilihan rasional yang dilakukan oleh para pejabat yang memiliki kepentingan – kepentingan pribadi, yang bertindak dalam kerangka istitusi tertentu dan dalam konteks yang nyata.<sup>12</sup>

Gagasan Barbara Geddes terkait *The Political Uses of Bureaucracy* dikemukakan bahwa kecenderungan penguasaan secara terus menerus dalam memanfaatkan birokrasi didasari oleh 4 alasan<sup>13</sup>. Pertama, *As a source of particularized benefits for constituents*; dalam konteks ini birokrasi sebagai agen penyebaran keuntungan yang diperoleh konstituen ada semacam “konsensus tidak tertulis” bahwa ketika politisi menang dalam pemilu, baik di eksekutif maupun legislatif, maka birokrasi acapkali dijadikan sebagai agen penyebar keuntungan – keuntungan kepada konstituennya.

Kedua, *as a source of patronage and other benefit to politicians whose support the president need to remain in office and initiate new laws and*

---

<sup>11</sup> Barbara Geddes, (1994). “*Politicians Dilemma, Building State Capacity in Latin America*” , Berkeley: university of California Press. Hal. 8

<sup>12</sup> Ibid, Hal.8

<sup>13</sup> Ibid, hal. 135 - 139

*program.* Dalam konteks ini birokrasi dijadikan sebagai sumber patronase dan keuntungan bagi para politisi lainnya yang mendukung kebutuhan incumbent sebagai *executive leader* membutuhkan birokrasi agar dapat membuat peraturan – peraturan baru atau program – program yang bisa digunakan untuk “membeli dukungan” dari politisi yang berada di lembaga legislatif.

Ketiga, *as a source of benefits to member of political organization loyal to the president.* Dalam kondisi ini, birokrasi justru berposisi sebagai sumber guna menjaring anggota – anggota dari berbagai organisasi politik yang loyal kepada *executive leader*. Apa yang menjadi dasar kepentingan dan tindakan ini tidak lain untuk menjadikan birokrasi sebagai mesin politik yang loyal (*creation of loyal political machine*) bagi kebutuhan politisi yang berkuasa. Hal ini acapkali dilakukan melalui kompromi politik terlebih dahulu terkait dengan penempatan birokrasi orang – orang yang dianggap loyal, baik di birokrasi itu sendiri, ataupun orang partai dari organisasi publik di luar birokrasi guna menduduki posisi atau jabatan strategis di dalam pemerintahan tersebut.

Keempat, *as a instrument for effective implementation of policies and program that benefit groups of citizen in both the short and long run.* Dalam hal ini, adanya pemanfaatan posisi justru dijadikan sebagai instrumen bagi para aktor untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan yang menguntungkan kelompok – kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat baik dalam kepentingan jangka panjang maupun pendek.



konsep *political incentives* telah banyak di kembangkan di negara-negara maju. Di negara seperti Inggris dalam bukunya yang ditulis oleh Jean-Jacques Laffont, *Incentives and political economy* (Oxford University Press, 2001) menyatakan bahwa *Mainstream economics* telah mengakui baru-baru ini kebutuhan untuk memasukkan kendala politik dalam analisis ekonomi yang ditujukan untuk penasihat kebijakan.

Insentif dan Ekonomi Politik menggunakan kemajuan terbaru dalam teori kontrak untuk membangun pendekatan normatif desain konstitusional dalam *environments*, yaitu tetap dalam tradisi desain konstitusional dengan kontrak yang lengkap. Ini menggambarkan politisi sebagai pengawas informasi. Dalam studi tersebut Laffont juga menjelaskan bagaimana Konstitusi harus mengendalikan mereka, khususnya untuk menghindari penangkapan oleh kelompok-kelompok kepentingan dan Teori insentif untuk pemisahan kekuasaan atau sistem *checks and balances* yang dikembangkan tidak akan tergambar dalam buku tersebut. Laffont mengakui ketidaklengkapan kontrak konstitusional yang meninggalkan kebijakan untuk *politicians* yang dipilih oleh proses pemilihan. Informasi asimetris asosiasi informasi dengan kebijakan ekonomi dan permainan politik menjadi permainan redistribusi mahal dari kontrak mereka. Profesor Laffont menyelidiki penjualan (*trade-off*) antara konstitusi fleksibel yang meninggalkan sedikit keleluasaan untuk politisi tetapi pengorbanan *ex-efisiensi* pos dan bobot konstitusi dan arah efisiensi *ex-post* tetapi juga memberikan keleluasaan yang cukup besar kepada para politisi untuk mengejar agenda pribadi.

Laffont mempertimbangkan kembali pemodelan kolusi informasi asimetris. Ini mengusulkan pendekatan baru untuk karakterisasi insentif yaitu kendala untuk perilaku kelompok ketika informasi asimetris adalah *non-diverification*. Ini menyediakan metodologi untuk mengkarakterisasi respon konstitusional optimal untuk kegiatan kelompok kepentingan dan mempelajari desain dari setiap institusi yaitu perilaku kelompok kepentingan. Praktek politik insentif tersebut tergambarkan di Negara China dimana insentif politik dapat tercipta antara pengusaha dan politisi untuk menutupi informasi – informasi negatif tentang mereka.

*“theories of authoritarian politics argue that to maintain power the government has to demonstrate strengths, for example through economic power (tullock, 1987). In addition, chinese culture values social conformity and the maintenance of relationships. Releasing information that draws unwanted attention or public scrutiny to the firm, local politicians or the state is costly. As such, politicians are much more inclined to suppress bad news than good. This negative information would reveal a sign of weakness or result in a “loss of face” for both local politicians and the central government or key market participants. Moreover, government policy during the latter half of our sample period specifically stressed the importance of maintaining social “harmony”, the existence of this policy also creates significant incentives for politicians and executives to not disrupt the government narrative around visible political events [teori politik otoriter berpendapat bahwa untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah harus menunjukkan kekuatan, misalnya melalui kekuatan ekonomi (Tullock, 1987). Selain itu, budaya Cina nilai kesesuaian sosial dan pemeliharaan hubungan ikut diperhatikan. Melepaskan informasi yang menarik perhatian yang tidak diinginkan atau pengawasan publik untuk perusahaan, politisi lokal atau Negara . Dengan demikian, politisi jauh lebih cenderung untuk menekan berita buruk daripada yang baik. Informasi negatif ini akan mengungkapkan tanda kelemahan atau hasil dalam “lose of face” untuk kedua politisi lokal dan pemerintah pusat jika berita tak terduga atau balas kebijakan resmi atau harapan dari pemerintah atau pelaku pasar tercipta. Selain itu, kebijakan pemerintah pada paruh kedua periode sampel kami khusus menekankan pentingnya menjaga sosial “harmoni,”*



*adanya kebijakan ini juga menciptakan insentif yang signifikan bagi para politisi dan eksekutif untuk tidak mengganggu proses pemerintahan].<sup>14</sup>*

Pola *listing* ini memungkinkan kita untuk mendapatkan sampel besar perusahaan dengan perhubungan yang kuat untuk politisi lokal dan insentif mereka. Selain itu, perusahaan China yang dikendalikan negara menderita berbagai konflik pemerintahan, perilaku investasi yang tidak efisien dan kinerja keuangan yang lemah. Tujuan politik dan insentif yang bertentangan mengendalikan dan pemegang saham minoritas memungkinkan perilaku *rent-seeking* dan menciptakan inefisiensi yang signifikan dalam perusahaan *firm*. Untuk sejauh bahwa pelepasan informasi negatif atau wahyu dari perilaku perusahaan yang tidak efisien yang mahal kepada para politisi dan manajer lokal, perusahaan yang dikendalikan negara di Cina memiliki kedua motif dan kesempatan untuk menekan informasi tentang *outcomes*.

Cina adalah negara dengan sistem ekonomi berbasis hubungan sebagai hasilnya, hubungan sosial dan politik memiliki bantalan signifikan terhadap keputusan negara agen-agen ekonomi dan nilai perusahaan. Mengingat bahwa akses ke modal dan investasi peluang eksternal tergantung pada kehadiran koneksi politik di Cina, ketergantungan tersebut menyediakan saluran dimana politisi lokal dapat memberi atau menolak manfaat bagi entitas non-BUMN dan mempengaruhi pelaporan dan pengungkapan insentif semua perusahaan yang terdaftar (misalnya, Chen dan Yuan, 2004; Du, 2012). Dengan demikian, ini adalah masalah empiris apakah perusahaan milik non-negara

---

<sup>14</sup> Joseph D. Piotroski, T.J. Wong, Tianyu Zhang, *Political Incentives suppress Negative Financial Information : Evidence From Firms*. (Standford University, The Chinese University, City university of Hongkong : 2008), hlm. 10



yang terkena tingkat yang sama dari tekanan untuk menekan berita buruk daripada perusahaan milik negara.

Hal ini memungkinkan kita untuk memeriksa lebih lanjut sifat politik insentif tentang penindasan berita buruk. Terdapat variasi dalam atribut provinsi dan khusus perusahaan yang diharapkan dapat mempengaruhi biaya relatif melepaskan berita buruk di China memiliki satu kerangka kelembagaan umum. Variasi ini termasuk perbedaan dalam perusahaan afiliasi '(1) tingkat koneksi politik, (2) karakteristik pribadi politisi provinsi dan (3) tingkat kepemilikan pemerintah (dimiliki versus non-BUMN negara).<sup>15</sup>

Pertama, melalui hubungan langsung dengan pejabat pemerintah daerah, kegiatan perusahaan terhubung secara politik dan eksekutif cenderung lebih diteliti dari perusahaan dan eksekutif tanpa koneksi politik. Kami berharap bahwa hubungan ini merupakan manfaat politik dan dampak itu dapat berpotensi menaikkan biaya relatif dengan merilis berita buruk bagi perusahaan-perusahaan yang terkena dampak oleh kebijakan politisi, dan eksekutif.

Kedua, kita mengharapkan insentif untuk menekan informasi negatif di sekitar peristiwa politik bervariasi dengan karakteristik politik politisi lokal. Meskipun para pemimpin pemerintah pusat ingin meningkatkan pertumbuhan dan transparansi di negeri ini, mereka berada di bawah tekanan konstan untuk mempertahankan stabilitas sosial dan kekuasaan politik. Hal ini akan menyebabkan promosi pada pejabat yang paling setia kepada pemimpin

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 13 - 19

darimereka kader yang memiliki prestasi terbaik sebelumnya. Shih, Adolph dan Liu (2012) dokumen yang pejabat milik faksi politik atau memiliki status yang memiliki kesempatan lebih tinggi secara signifikan dipromosikan dalam hirarki pemerintah China. Ketika politisi sedang dipromosikan berdasarkan politik faksi atau kronisme bukan meritokrasi, mereka ingin dianggap sebagai kandidat yang telah mencapai kinerja yang luar biasa. Dengan demikian, kami berharap bahwa mereka memiliki insentif yang lebih kuat untuk menekan berita buruk menjelang pengumuman promosi, dan lebih banyak berita buruk akan dirilis setelah promosi.

Ketiga, kami menguji apakah kepemilikan negara akan meningkatkan insentif perusahaan untuk menekan berita buruk. Mayoritas perusahaan domestik yang terdaftar di China di bursa saham (Shanghai dan Shenzhen) adalah entitas yang dikendalikan negara. Pada awal tahun kalender 2010, entitas yang dikendalikan negara menyumbang sekitar 65 persen dari perusahaan yang terdaftar dan 89 dari total kapitalisasi pasar di China.

### C. Teori Pertukaran Jaringan

Teori pertukaran jaringan (*network exchange theory*) mengkombinasikan teori pertukaran sosial dan analisis jaringan. Kombinasi ini diasumsikan menyempurnakan kelebihan kedua teori sambil memperbaiki kekurangannya. Disatu sisi, analisis jaringan mempunyai keunggulan mampu membangun representasi yang kompleks dari interaksi sosial mulai dari model relasi sosial yang sederhana dan dapat digambarkan, tetapi Cook dan Whitemayer (1992: 123) mengatkan bahwa analisis ini mempunyai kekurangan tentang konsep

relasi itu sendiri. Di lain pihak, teori pertukaran sosial mempunyai keunggulan karena memiliki model aktor tunggal yang membuat pilihan berdasarkan manfaat yang mungkin diraih, namun mempunyai kekurangan karena ia melihat struktur sosial terutama sebagai hasil dari pilihan individu ketimbang sebagai suatu determinan pilihan – pilihan tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa teori jaringan mempunyai struktur yang kuat (jaringan relasi), tetapi mempunyai model yang lemah mengenai unsur relasi, sementara teori pertukaran mempunyai model relasi antara aktor yang kuat (pertukaran), tetapi memiliki model struktur sosial yang lemah. Model teori pertukaran sosial dari pertukaran aktor untuk memperbesar keuntungan akan melengkapi isi analisis jaringan, dan analisis jaringan akan menyediakan model struktur sosial sebagai variabel independen yang kurang dimiliki oleh teori pertukaran.

#### **a. Kekuasaan Struktural**

Kekuasaan struktural adalah salah satu alasan untuk mengaitkan teori pertukaran dengan analisis jaringan agar dapat bergerak melampaui analisis kekuasaan di dalam relasi diadik (*dyadic*) dan dapat menganalisa distribusi kekuasaan dalam jaringan secara keseluruhan. Ini menjadi salah satu topik paling penting dalam teori pertukaran jaringan kontemporer. Untuk melihat distribusi kekuasaan dalam jaringan Cook dan rekannya (1983) mengembangkan teori “*vulnerability*”. Mereka mengatakan bahwa determinasi kekuasaan dari suatu posisi adalah didasarkan pada banyaknya ketergantungan seluruh struktur pada posisi



itu. Menurut mereka, ketergantungan pada sistem yang luas ini adalah fungsi dari sentralisasi struktural dari posisi tersebut dan sifat relasi kekuasaan – ketergantungan. Dengan kata lain, *Vulnerability* melibatkan ketergantungan jaringan pada posisi struktural tertentu.

#### **b. Struktur Kekuasaan yang kuat dan lemah**

Teori pertukaran jaringan membedakan antara dua tipe jaringan yaitu kuat dan lemah yang didasarkan pada apakah aktor dapat dikeluarkan dari pertukaran atau tidak. Jaringan kekuasaan yang kuat meliputi beberapa aktor yang pasti dikeluarkan (aktor kekuasaan rendah) dan aktor lain yang tidak dapat dikeluarkan (aktor kekuasaan tertinggi).

Salah satu keuntungan dari pengaitan teori pertukaran dengan analisis jaringan adalah meluasnya pandangan tentang agen (agency). Analisis jaringan cenderung mengecilkan agen dan berkonsentrasi untuk mendeskripsikan properti struktur tertentu. Teori pertukaran mengandung model agen *self-interested* rasional, namun model ini mengabaikan kekuatan agen untuk mengubah struktur guna memperkuat posisi tawar – menawar mereka. Leik (1992) menggunakan teori pertukaran jaringan untuk meneliti “manipulasi strategi terhadap keterkaitan jaringan” yang dilakukan aktor. Ini menunjukkan bahwa posisi yang rendah, seperti kompetitor yang memperebutkan promosi, mungkin mencari sumber promosi lain dalam rangka memperkuat posisi mereka, sedangkan “aktor kekuasaan tinggi lebih memilih mengisolasi mereka yang tergantung padanya”.

#### D. Kerangka Pemikiran

Kartel politik yang tercipta dikalangan elit telah menciptakan insentif kekuasaan yang akan melahirkan kartelisasi kekuasaan oleh elit politik, birokrasi, Partai Politik, penegak hukum dan Pengusaha. Kartelisasi tersebut dapat tercipta jika ditunjang dengan telah terciptanya basis kekuasaan politik, ekonomi maupun sosial yang kuat oleh elit baik yang tercipta ditingkat nasional maupun lokal atau daerah. Penulis akan membahas tentang bagaimana kartel politik mampu tercipta Di Kota Makassar dan implikasinya terhadap kekuasaan walikota. Tuntutan elit politik, birokrat, partai politik, penegak hukum dan pengusaha untuk tetap mampu mempertahankan atau memperbesar kekuasaannya dalam menguasai sumber daya publik Di Sulawesi Selatan telah mendorong mereka untuk membentuk kartel.

Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep kartel politik konsep *political incentives* dan konsep pertukaran jaringan dalam membentuk kerangka pemikiran. Diharapkan konsep – konsep yang terdapat didalamnya dapat mendukung topik pembahasan. Berikut merupakan skema untuk memperjelas alur kerangka pemikiran penulis :

## SKEMA PIKIR





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan aspek – aspek penelitian yang diterapkan oleh penulis sebagai pedoman dalam memahami penelitian ini, sehingga penelitian dapat tergambarkan secara ilmiah. Aspek – aspek tersebut yaitu Unit Analisis Data, Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisa Data.

##### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini di laksanakan di Sulawesi Selatan tepatnya Di kota makassar, hal ini dikarenakan kota makassar merupakan area fokus penelitian dan merupakan daerah peristiwa pemilihan walikota. Penulis juga Memilih Kota Makassar karena dianggap sebagai wilayah ibu kota provinsi dan merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian daerah sehingga menjadi tempat berkumpulnya elit politik, birokrat, parpol, dan pengusaha besar daerah sulawesi selatan sehingga Kota Makassar menjadikiblat dari semua daerah kabupaten. Dengan kata lain objek – objek yang di harapkan penulis berada di Kota Makassar.

##### **B. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksploratif analitis. Adapun pertimbangan untuk menggunakan metode eksploratif analitis adalah untuk mengembangkan fenomena dan potensi – potensi yang akan muncul dari fenomena tersebut sehingga fenomena tersebut dapat diketahui dan dipahami.

Penelitian diarahkan untuk mengembangkan dan menganalisis fakta mengenai kartel politik yang di ciptakan oleh elit – elit politik dan pengusaha Di Kota Makassar untuk sama – sama menguasai sumber daya publik. Sedangkan, dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan tipe dan dasar penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

#### **a. Data primer**

Penulis memperoleh data primer melalui observasi dan wawancara mendalam kepada informan – informan kunci yaitu politisi – politisi, lembaga – lembaga sosial dan pengusaha Di Kota Makassar. Wawancara mendalam terhadap informan tersebut akan mendukung fakta kartel politik Di Kota Makassar.

#### **b. Data sekunder**

Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka yaitu berasal dari dokumen – dokumen grafis seperti tabel, catatan, sms, foto dan lain – lain. Penulis melakukan telaah pustaka melalui penelitian – penelitian sebelumnya dalam bentuk buku, jurnal dan artikel – artikel yang di tulis dalam media cetak dengan sumber yang jelas terkait kartel politik Di Kota Makassar. Penulis juga menggunakan literatur, dokumen dan referensi dari media internet guna melengkapi data – data primer sebelumnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### **a. Observasi**

Observasi yang dilakukan merupakan pengamatan langsung terhadap kondisi yang menjadi sasaran penelitian. Tujuan utamanya adalah peneliti dapat memahami secara mendalam terkait perilaku, kebiasaan, dan kondisi lapangan.

##### **b. Wawancara**

Penulis memilih melakukan wawancara mendalam. Untuk menghindari kehilangan informasi, maka penulis meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian.

Informan – informan yang akan penulis wawancarai yaitu :

1. Pemerintah kota makassar
2. DPRD Kota Makassar

##### **c. Dokumen/arsip/literatur keputakaan/hasil penelitian sebelumnya**

Apabila dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan dokumen – dokumen berbentuk gambar dan tulisan untuk melengkapi data – data pada penelitian ini dengan melampirkan bagian foto, gambar, peraturan, kebijakan dan catatan kehidupan untuk



melengkapi bukti pada penelitian sehingga dapat menunjang data primer yang telah ada.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dengan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi penulis menganalisis dengan *interpretative phenomenological analysis* sebagaimana di tulis oleh Smith (2009: 79-107)<sup>16</sup>. Tahap – tahap *interpretative phenomenological analysis* yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. *Reading and re-reading*

Dengan membaca dan membaca kembali peneliti menenggelamkan diri dalam data yang original. Bentuk kegiatan tahap ini adalah menuliskan transkrip *interview* dari rekaman audio kedalam transkrip bentuk tulisan.

2. *Initial noting*

Analisis ini hampir sama dengan analisis tekstual bebas. Disini tidak aturan apakah dikomentari atau tanpa persyaratan seperti membagi teks kedalam unit – unit makna dan memberikan komentar – komentar pada masing – masing unit. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan seperangkat catatan dan komentar yang komperhensif dan mendetail mengenai data.

3. *Developing Emergent Themes* (mengembangkan kemunculan tema – tema)

---

<sup>16</sup> Mami Hajaroh, jurnal;*Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi*, (yogaykarta :FIB UNY Program Studi Kebijakan Pendidikan, Bidang Keahlian Penelitian dan Evaluasi Pendidikan), hlm. 10 - 19

Meskipun transkrip interviu merupakan tempat data, akan tetapi data itu akan menjadi lebih jelas dengan di berikannya komentar eksploratori (*eksploratory commenting*) secara komprehensif dengan komentar eksploratori tersebut maka pada seperangkat data muncul atau tumbuh secara substansial.

#### 4. *Searching for connection a cross emergent themes*

Partisipan penelitian memegang peran penting semenjak mengumpulkan data dan pembuatan komentar eksploratori dilakukan dengan berorientasi pada partisipan. Mencari makna dari sketsa tema – tema yang muncul dan saling bersesuaian dan menghasilkan struktur yang memberikan pada peneliti hal – hal yang penting dari semua data dan aspek – aspek yang menarik dan penting dari keterangan – keterangan partisipan. Hubungan – hubungan atau koneksi – koneksi yang mungkin muncul dalam *interpretative phenomenological analysis* selama proses analisis meliputi :

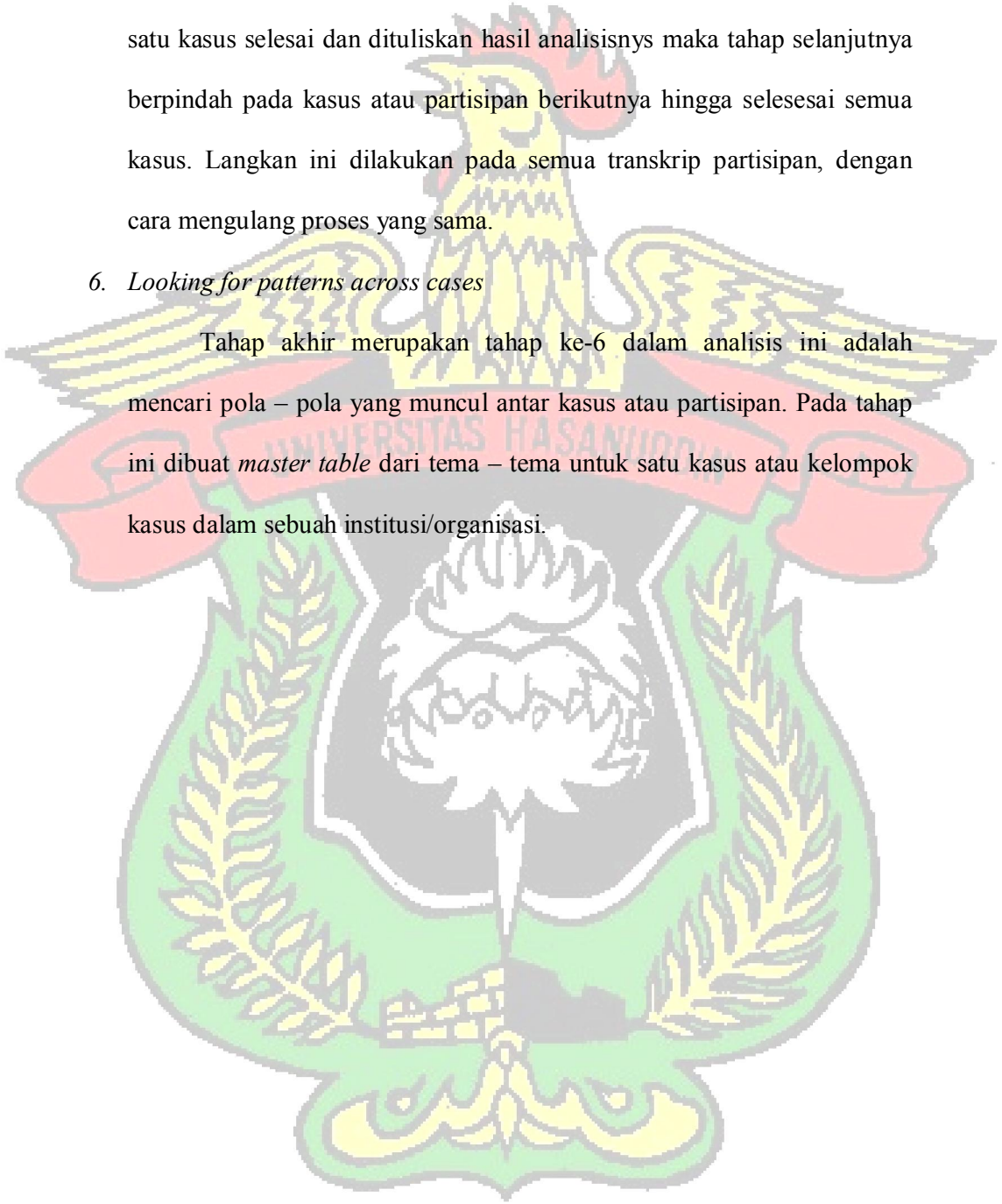
- 1) *Abstraction*;
- 2) *subsumtion*;
- 3) *polarization*;
- 4) *contextualization*;
- 5) *numeration*; dan
- 6) *function*.

#### 5. *Moving the next cases*

Tahap analisis 1-4 dilakukan pada setiap satu kasus/partisipan. Jika satu kasus selesai dan dituliskan hasil analisisnya maka tahap selanjutnya berpindah pada kasus atau partisipan berikutnya hingga selesai semua kasus. Langkah ini dilakukan pada semua transkrip partisipan, dengan cara mengulang proses yang sama.

#### 6. *Looking for patterns across cases*

Tahap akhir merupakan tahap ke-6 dalam analisis ini adalah mencari pola – pola yang muncul antar kasus atau partisipan. Pada tahap ini dibuat *master table* dari tema – tema untuk satu kasus atau kelompok kasus dalam sebuah institusi/organisasi.





## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini akan di uraikan gambaran umum lokasi penelitian untuk memudahkan pembaca memahami situasi dan kondisi objek penelitian. Penulis akan menguraikan konstalasi politik lokal Kota Makassar, sektor ekonomi dominan Kota Makassar, aktor politik dan bisnis Kota Makassar, kebijakan Di Kota Makassar, dan visi – misi Kota Makassar.

#### **A. Gambaran Umum Kota Makassar**

Kota makassar merupakan ibu kota provinsi sulawesi selatan yang posisinya strategis karena menjadi pintu dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur indonesia. Kota makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai tallo dan sungai jeneberang. Ketinggian kota bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Luas wilayah perairan kurang lebih 175,77  $km^2$  daratan, termasuk 11 pulau di selat makassar dan luas wilayah perairan kurang lebih 100  $km^2$ .

Jumlah penduduk kota makassar sebesar 1.339.374 jiwa. Penduduk ini tersebar dalam 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan tamalate, mariso, wajo, ujung tanah, tallo, tamalanrea dan biringkanaya. Pada umumnya, penduduknya beragama islam yang terdiri atas

berbagai etnis yang di dominasi oleh suku makassar dan bugis serta suku toraja, mandar. Buton, tionghoa, jawa dan sebagainya.

#### **A.1 Konstalasi Politik Lokal Kota Makassar**

Meskipun masyarakat makassar mayoritas beragama islam, namun dalam konstalasi politik lokal, partai – partai berbasis ideologi sekuler dan nasionalis memegang peranan kuat. Sejak orde baru provinsi sulawesi selatan termasuk kota makassar dikenal sebagai daerah basis tradisional partai golkar. Kondisi ini berlanjut hingga orde reformasi. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari fakta besarnya peran tokoh masyarakat Sulawesi Selatan terhadap keberadaan Golkar. Sebagai contoh Yasin Limpo ayah dari gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo adalah salah satu pendiri Golkar dan seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati Di Sulawesi Selatan. Contoh lain adalah H. Jusuf Kalla dan H. M. Aksa Mahmud, dua tokoh Sulawesi Selatan yang juga merupakan tokoh Golkar.

Pada pemilu legislatif tahun 2009 Di Kota Makassar berdasarkan sebaran parpol dan perolehan kursi diketahui bahwa pemenangnya adalah partai Golkar dengan 9 kursi, disusul partai demokrat, partai demokrasi kebangsaan, partai amanat nasional, partai keadilan sejahtera dengan masing – masing 5 kursi, dan seterusnya. Pada pemilu 2009 tersebut, daftar pemilih tetap adalah sebanyak 1.016.799 orang yang menyumbangkan jumlah suara sah dalam pemilu sebanyak 530.978 orang. Ada 13 partai politik pemenang kursi DPRD yang jika jumlah

suara sahnya di tambahkan adalah sebanyak 76,76% dari jumlah suara yang masuk.

**Tabel 1. Perolehan Kursi Parpol Di DPRD Kota Makassar Tahun 2004-2009**

No.	Partai Politik	Perolehan kursi	(%)	Jumlah Suara Sah Parpol DI DPRD	(%)
1.	Partai Golongan Karya	9	18	100.195	18,87
2.	Partai Demokrat	5	10	83.865	15,80
3.	Partai Demokrasi Kebangsaan	5	10	34.233	6,45
4.	Partai Amanat Nasional	5	10	37.000	6,97
5.	Partai Keadilan Sejahtera	5	10	31.742	5,98
6.	Partai Hati Nurani Rakyat	3	6	18.578	3,50
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	6	18.239	3,43
8.	Partai Persatuan Pembangunan	3	6	18.651	3,51
9.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	4	16.533	3,11
10.	Partai Bulan Bintang	1	2	13.460	2,53
11.	Partai Bintang Reformasi	1	2	12.693	2,39
12.	Partai Karya Perjuangan	1	2	87.62	1,65
13.	Partai Damai Sejahtera	1	2	14.177	2,67
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>100</b>	<b>408.128</b>	<b>76,76</b>

Sumber : Diolah dari “Pemnyumbang Lidah Rakyat : Profil Anggota DPRD Kota Makassar Tahun 2009-2014”. KPU Kota Makassar. 2009. Hal. 137-139.

Preferensi politik kota makassar adalah Partai – Partai berbasis sekuler dan nasionalis. Ke-13 Partai pemegang kursi ini kemudian membentuk 7 fraksi di DPRD, yakni fraksi Partai Golkar dengan 11 anggota, fraksi Partai Demokrat dengan 9 anggota, Fraksi Makassar bersatu yang jumlah kursinya sama dengan fraksi Partai Demokrat, adalah Fraksi Gabungan yaitu Partai Gerindra, PDI-Perjuangan, Partai Damai Sejahtera, Partai



Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, Partai Karya Perjuangan dan seterusnya.

**Tabel 2. Anggota DPRD Kota Makassar Menurut Fraksi Januari s/d Desember 2010**

No.	Fraksi	Jumlah Anggota
1.	Fraksi Partai Golongan Karya	11
2.	Fraksi Partai Demokrat	9
3.	Fraksi Amanat Nasional	5
4.	Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan	5
5.	Fraksi Keadilan Sejahtera	5
6.	Fraksi Makassar Bersatu	9
7.	Fraksi Persatuan Nurani	6
<b>Total</b>		<b>50</b>

*Sumber : BPS “Makassar dalam Angka 2011”.*

Dari *mapping* anggota DPRD periode tersebut berdasarkan buku terbitan KPU kota Makassar tahun 2009 yakni “Penyambung Lidah Rakyat : Profil Anggota DPRD Kota Makassar tahun 2009 – 2014” maka diketahui bahwa berdasarkan latar belakang pekerjaan sebelum menjadi anggota DPRD adalah paling banyak dari pengusaha sebanyak 13 orang (26%). Karyawan swasta sebanyak 12 orang (22%), wiraswasta dan LSM masing – masing sebanyak 3 orang (6%), imam masjid dan tanpa keterangan masing – masing sebanyak 2 orang (4%), serta konsultan, pengacara, politisi dan jurnalis yang masing – masing sebanyak 1 orang (2%). Sebenarnya, buku tersebut juga mencatat adanya anggota DPRD pertahanan yang juga berstatus pengusaha. Jika data terkait pengusaha ini di gabungkan maka presentase pengusaha dalam DPRD masih lebih besar yakni 18 orang (36%).

Pada pemilihan legislatif 2014 – 2019 dari 5 dapil terpilih 50 anggota DPRD Kota Makassar dari dapil 1 meliputi Kecamatan Makassar, Ujung Pandang dan Rappocini terpilih 9 anggota DPRD, dari dapil 2 meliputi kecamatan Wajo, Bontoala, Tallo dan Kecamatan Ujung Tanah terpilih 10 anggota DPRD, dari dapil 3 meliputi kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea terpilih 10 anggota DPRD, dari dapil 4 meliputi kecamatan panakukang dan manggala terpilih 10 anggota DPRD dan dari dapil 5 meliputi kecamatan Mariso, Mamajang dan tammalate terpilih 11 anggota DPRD.

**TABEL .3 Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2014 s/d 2019**

No.	NAMA	PARPOL
<b>Dapil 1</b>		
1.	H. Irwan Djafar, SE	NASDEM
2.	Mudzakkir Ali Djamil, ST	PKS
3.	H. M. Munir Mangkana, SH	PDIP
4.	Ir. Farouk M. Betta, MM	GOLKAR
5.	Erik Horas, SE	GERINDRA
6.	Drs. H. Agung Wirawan	DEMOKRAT
7.	H. Zaenal DG. Betta, S.Sos, M.Si	PAN
8.	Fasruddin Rusli, SE	PPP
9.	Mustagfir Sabry, S.Ag, M.Si	HANURA
<b>Dapil 2</b>		
1.	Rudianto Lallo, SH	NASDEM
2.	Irwan, ST	PKS
3.	William	PDIP
4.	H. Abdul Wahab Tahir, SH	GOLKAR
5.	H. Saharuddin Said, SE	GOLKAR
6.	A. Pahlevi, SE	GERINDRA
7.	Basdir, SE	DEMOKRAT
8.	Hj. Fatma Wahyuddin, ST, MM	DEMOKRAT
9.	H. Sampara Sarip, SH	PPP
10.	DR. H. M. Yunus H J, M.Si	HANURA
<b>Dapil 3</b>		
1.	Mario David P N, S.Sos	NASDEM

2.	H. Muhammad Iqbal	PKS
3.	Melani Mustari, SE	GOLKAR
4.	Drs. H. Andi Hasir H S, MI. Kom	GOLKAR
5.	Hj. Lisdayanti Sabri	GERINDRA
6.	Abdi Asmara, SH	DEMOKRAT
7.	H. Syarifuddin, SE	DEMOKRAT
8.	H. Sangkala Saddiko, SH	PAN
9.	Abdul Wahid, S.Sos	PPP
10.	Andi Abdul Kadir, SE	HANURA
<b>Dapil 4</b>		
1.	Supratman	NASDEM
2.	Hj. Haslinda, S.Sos, M.si	PKS
3.	Mesakh Raymond Rantepadang, SH	PDIP
4.	H. Samsuddin Kadir, SE	GOLKAR
5.	Rahman Pina, S.IP	GOLKAR
6.	Drs. Amar Bustanul	GERINDRA
7.	Adi Rasyid Ali, SE	DEMOKRAT
8.	Hamzah Hamid, S.Sos, MM	PAN
9.	Ir. H. Abdul Aziz Namu, SE, M.Si	PPP
10.	H. Jufri	HANURA
<b>Dapil 5</b>		
1.	Indira Mulyasari Paramastuti Ilham	NASDEM
2.	Yeni Rahman, S.Si	PKS
3.	Andi Vivin Sukmasari, SE, ST	PDIP
4.	Ir. A. Nurman M, M.Si	GOLKAR
5.	Ir. Mustafa Alwi	GERINDRA
6.	Susuman Halim, SE	DEMOKRAT
7.	Hasanuddin Leo, SE, M.Si.Ak	PAN
8.	H. Busranuddin BT, SE	PPP
9.	Shinta Mashita Molina, A. MD	HANURA
10.	DR. Muh. Said, MM	PBB
11.	Arifin Dg. Kulle, SE	PKPI

*Sumber: Arsip DPRD Kota Makassar*

Pada pemilihan umum legislatif anggota DPRD Kota Makassar Partai Golkar masih menjadi pemenang dengan lolosnya 8 anggota partainya disusul oleh Partai Demokrat 7 anggota selanjutnya Partai Nasdem, PKS, Gerindra, PPP, Hanura masing – masing 5 anggota dan PDIP 4 anggota, PAN 4 anggota, PBB 1 anggota, serta PKPI 1 anggota.



Ketua DPRD kota makassar untuk periode 2014- 2019 adalah Farouk M. Beta dari Partai Golkar, Wakil Ketua Satu Adi Rasyid Ali dari Partai Demokrat, Wakil Ketua Dua dari Partai Gerindra, dan Wakil Ketua Tiga Indira Mulyasari Pramastuti Ilham dari Partai Nasdem.

## **A.2 Sektor Ekonomi Dominan Di Kota Makassar**

Makassar adalah kota perdagangan dan industri yang sangat strategis bagi kawasan Indonesia Timur. Terletak di pesisir barat dari provinsi Sulawesi selatan, sebagai ibu kota provinsi Makassar menjadi pusat distribusi berbagai barang dan komoditas kebutuhan masyarakat untuk Sulawesi dan pulau – pulau lain di kawasan Indonesia timur. Distribusi tersebut dilaksanakan melalui pelabuhan laut Soekarno-Hatta. Dalam sektor transportasi udara, bandara Sultan Hasanuddin yang terletak Di Timur Laut Kota Makassar (tepatnya Di Kabupaten Maros) juga merupakan *central-hub* untuk penerbangan komersial ke Maluku, Papua dan kawasan lain Di Indonesia Timur.

Untuk pengembangan sektor industri, pabrik dan pergudangan maka pemerintah kota Makassar bekerjasama dengan negara Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengembangkan kawasan industri Makassar (KIMA) dengan area seluas 203 Ha dan akan dikembangkan menjadi 703 Ha. Bentuk pengelolaannya adalah PT. Persero kawasan industri Makassar yakni sebuah badan usaha milik negara. KIMA merupakan kawasan industri pertama di kawasan timur

indonesia yang lokasinya berada di kelurahan daya dan bira kecamatan biringkanaya, sekitar 15 km dari pusat kota Makassar. KIMA dapat ditempuh 20 menit dari pelabuhan laut Soekarno Hatta melalui jalan tol dan 20 menit dari bandar udara hasanuddin yang menjadikan KIMA sangat strategis sebagai pusat pengembangan berbagai jenis industri Di Kawasan Timur Indonesia.

Pada awal berdirinya, PT. Persero Kawasan Industri Makassar bernama “Ujung Pandang Industri Estate (UPIE)”. Pembentukan UPIE dilakukan oleh pemda tingkat I Sulawesi Selatan beserta kanwil perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dan JICA (*Japan International Cooperation Agency*) pada tahun 1975/1976. Pada tanggal 16 maret 1998 berubah menjadi PT. Persero Kawasan Industri Makassar. Kepemilikan sahamnya adalah 100% pemerintah dengan komposisi sebagai berikut; negara republik indonesia sebesar 60%, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 30%, pemerintah kota Makassar sebesar 10%. Pada saat ini menampung hampir 200 perusahaan yang membuka gudang ataupun pabrik pengolahan didalamnya. Perusahaan yang beroperasi berasal dari dalam maupun luar negeri.

Sebagai kota perdagangan dan pusat persinggahan memasuki kawasan Indonesia timur, para pengusaha Di Kota Makassar berlomba – lomba melakukan investasi dibidang terkait antara lain dengan membangun mall, pusat perbelanjaan, gedung pertemuan, dan lain – lain. Khusus untuk jumlah mall dan pusat perbelanjaan Di Makassar ada lebih dari 10.

Makassar juga memiliki kawasan niaga Tanjung Bunga, sebuah kawasan yang mengintegrasikan antara pusat perbelanjaan, sarana hiburan, restoran, apartemen, dan hotel. Di kompleks ini berdiri Trans Studio yang diklaim sebagai *indoor theme park* terbesar dunia pada waktu awal kemunculannya. Untuk mendukung kegiatan bisnis dan perdagangan, kota makassar juga memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Kota makassar tercatat memiliki lebih dari 100 hotel dan apartemen.

### **A.3 Aktor Politik dan Bisnis Kota Makassar**

Posisi kota makassar yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan membuat Kota Makassar dipenuhi oleh politisi ulung. Kota makassar merupakan daerah basis tradisional partai Golkar yang pengaruhnya hingga ke Jakarta. Nama – nama politisi lokal dari makassar yang kemudian merambah ke Jakarta menjadi politisi nasional, misalnya Jusuf Kalla, Aksa Mahmud, Alifian Mallarangeng, dan masih banyak lainnya. Secara umum para politisi nasional dari Sulawesi Selatan menempa diri bertahun – tahun dalam kancah politik lokal baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Kawah candradikuma terbaik untuk penempatan politisi lokal adalah di Kota Makassar.

#### **- Syahrul Yasin Limpo (SYL)**

Syahrul yasin limpo merupakan Gubernur Sulawesi Selatan hingga sekarang dan juga merupakan ketua DPD I Partai Golkar untuk Sulawesi Selatan. SYL lahir di Ngawing, Makassar pada tanggal 15



maret 1995 dan merupakan anak kedua dari pasangan H. Muh. Yasin Limpo dengan Hj. Nurhayati Yasin Limpo. Pendidikan tinggi dimulainya dari jenjang S1 hingga S3 Di Universitas Hasanuddin. SYL pernah menjabat sebagai bupati gowa selama dua periode, kemudian menjabat wakil gubernur sulsel selama satu periode mendampingi Amin Syam. SYL berasal dari keluarga Limpo yang dapat dikatakan sebagai dinasti politik lokal Sulawesi Selatan. Ayah dari SYL, Yasin limpo adalah seorang tokoh masyarakat terkenal sulawesi selatan dan istrinya juga pernah duduk menjadi anggota DPR dari fraksi Golkar selama 2 periode serta keluarga yang lainnya menempati posisi strategis untuk Sulawesi Selatan. Saat ini bisa dikatakan bahwa klan yasin limpo sangat berpengaruh di sulawesi selatan.

SYL lama berkecimpung diberbagai organisasi mulai politik hingga birokrasi pemerintahan. Pengalaman organisasinya adalah Sekertaris DPP KNPI Sulsel tahun 1990-1993, ketua DPP AMPI Sulsel tahun 1993-1998, Sekertaris DPP Golkar sulsel tahun 1993-1998, wakil ketua APKASI Pusat, Ketua FKPPi Sulsel tahun 2004-2008, Ketua FORKI Sulsel tahun 2004-2008, Ketua Kwarda Gerakan pramuka tahun 2004-sekarang, Ketua KOSGORO 57 sejak tahun 1998, ORARI Sulsel, Ketua DPD I Golkar Sulsel tahun 2009-Sekarang.

Sedangkan pengalaman kerja SYL adalah PNS tahun 1980, Kepala seksi tata kota tahun 1982, kepala sub bagian perangkat IV dan V para biro pemerintahan umum tahun 1983, kepala wilayah Kec. Bontonompo Kab. Gowa tahun 1984, Kepala bagian pemerintahan Setwilda Tk. I Sulsel tahun 1987, Kepala bagian pembangunan Setwilda Tk. I Sulsel tahun 1988, Kepala bagian urusan generasi muda dan OR Setwilda Tk. Gowa tahun 1989, Sekertaris wilayah daerah Tk. II Kab. Gowa tahun 1991, Kepala Biro Humas Setwilda Tk. I Sulsel tahun 1993, Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Gowa tahun 1991, Kepala Biro Humas Setwilda Tk. Tahun 1993, Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Gowa tahun 1994-2002, Wakil Gubernur Sulsel tahun 2003-2008, Gubernur Sulse tahun 2008 sampai sekarang.

SYL memiliki pengaruh kuat terhadap tokoh – tokoh masyarakat dan bisnis Di Sulawesi Selatan. Misalnya diketahui memiliki peran dalam pembangunan lapangan golf di kabupaten gowa yang menyita perhatian media lokal. Kekuatan SYL juga dibangun dari kedekatannya dengan tokoh – tokoh dunia hitam atau preman Makassar. Kedekatannya dengan tokoh dunia hitam bahkan sempat hampir mengakibatkan skandal, ketika beberapa tahun yang lalu di beberapa media lokal sempat termuat berita bahwa SYL tertangkap dalam sebuah operasi narkoba di salah satu hotel Di Makassar namun kasus tersebut sampai saat ini tidak pernah diungkap.

- Ilham Arif Sirajuddin (IAS)

IAS lahir Di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 September 1965 dari anak pasangan Arief Sirajuddin dan Hj. Djohra. Ayahnya bekas militer dan pejabat daerah. Istri IAS bernama Hj. Aliyah Mustika Abdullah, SE sedangkan anaknya 4 orang yakni Amirul Yasmin Ramadhanyah, Zulfikar Nur Alamsyah, St. Hamsinah Khaerunnisa, dan St. Mukhlisatul Amalia. Pendidikan tertingginya adalah S3.

Karir politik Ilham Arif Sirajuddin (IAS) dimulai dari Golkar. Beliau pernah menjabat wakil bendahara DPD II Golkar Makassar (1992-1997), Ketua Biro Pemuda dan Olahraga DPD I Golkar Sulawesi Selatan 1998-2001, Ketua DPD. Partai Golkar Kota Makassar (2001-2008), anggota DPRD Sulawesi Selatan (1999-2004), Ketua Kompartemen Koperasi KADIN Sulsel (1999-2004), ketua Kompartemen Sulsel (1999-sekarang), walikota makassar (2003-2008 dan 2008-2013), ketua DPD I Partai Demokrat Sulawesi Selatan (2010-2015).

Selain Memiliki karir di dunia politik, IAS juga berkecimpung di sektor lainnya. Sejak tahun 1992 – 1999, IAS merupakan Direktur PT. Mustika Pratama Persada, menjabat Sekertaris Umum REI Sulsel (1995-1999), Pengelola PSM Makassar sejak 1995, Ketua Harian AMPI Sulsel sejak 2000, Ketua IKA UMI Makassar, Anggota Kehormatan Sabuk Hitam Inkanas Forki Makassar, Anggota Makassar



Tiger Club Sulawesi Selatan, Pembina PBVSI Kota Makassar, dan Ketua HDCI Makassar (2010-2013).

- Moh. Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto)

Danny Pomanto lahir Di makassar 30 Januari 1964 yang berlatar belakang pendidikan Teknik Arsitektur berumur 51 tahun adalah Walikota Makassar yang menjabat sejak 8 mei 2014. Danny pomanto yang berpasangan dengan Syamsu Rizal dan diusung oleh Partai Demokrat dan PBB ini keluar sebagai pemenang Pilkada Kota Makassar 2013 dengan perolehan suara 182.484 atau 31, 18 persen mengungguli 9 pasangan lainnya.

Danny menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Ilham Arief Sirajuddin dan ia adalah seorang arsitek yang cukup diperhitungkan karyanya di sulawesi. Meskipun pengalaman politik dan organisasi Danny Pamanto tidak seluas Ilham Arif Sirajuddin namun ia mampu menarik perhatian masyarakat kota makassar hingga saat ini.

- Walikota – walikota makassar

**Tabel . 4**

**Walikota – walikota makassar**

No.	Nama Walikota	Masa Jabatan	
Hindia Belanda (Netherlands Indies)			
1.	J. E. Dambrink	15-8-1918	1927
2.	J.H. De Groot	1927	1931
3.	G. H. J. Beikenkamp	1931	1932
4.	Ir.F. C. Van Lier	1932	1933
5.	Ch. H. Ter Laag	1933	1934

6.	J. Leewis	1934	1936
7.	H. F. Brune	1936	1942
<b>Pendudukan Jepang</b>			
1.	B. Yamasaki	1942	-5-1945
2.	Nadjamuddin Dg. Malewa	-5-1945	11-9-1945
<b>Netherlands Indies Civiel Administration (NICA)</b>			
1.	H. F. Brune	11-9-1945	1945
2.	D. M. Van Zwieten	1945	24-12-1946
<b>Negara Indonesia Timur (N.I.T)</b>			
1.	ABD. Hamid Dg. Magassing	24-12-1946	27-12-1949
2.	C. Salawati	27-12-1949	17-8-1950
<b>Negara Kesatuan Republik Indonesia</b>			
1.	I. M. Qaimuddin	17-8-1950	1951
2.	J. Mewengkang	1951	1951
3.	Sampara Dg. Lili	1951	-1-1952
4.	Ahmad Dara Sjahruddin	-1-1952	15-5-1956
5.	M. Junus Dg. Mile	15-5-1956	7-1-1958
6.	A. Latif Dg. Massikki	7-1-1958	6-2-1960
7.	Aroeppala	6-2-1960	8-5-1965
8.	M. Dg. Patompo (Pejabat Sementara)	8-5-1965	12-7-1965
9.	M. Dg. Patompo	12-7-1965	18-7-1970
10.	H. M. Dg. Patompo (Pejabat Sementara)	18-7-1970	14-7-1973
11.	H. M. Dg. Patompo	14-7-1973	4-7-1978
12.	Abustam	4-7-1978	4-7-1983
13.	Drs. M. Parawansa (Pejabat Sementara)	4-7-1983	8-8-1983
14.	Jancy Raib	8-8-1983	8-8-1988
15.	Suwahyo	8-8-1988	8-8-1993
16.	Suwahyo (Pejabat Sementara)	8-8-1993	15-11-1993
17.	H. A. M. Ghalib, S.H (Pejabat Sementara)	15-11-1993	21-2-1994
18.	H. A. Malik B. Masry, SE, M.Si.	21-2-1994	8-5-1999
19.	Drs. H. B. Amiruddin Maula, SH, M.Si	8-5-1999	8-5-2004
20.	Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM	8-5-2004	8-6-2008
21.	Ir. H. Andi Herry Iskandar (Pejabat Sementara)	8-6-2008	8-1-2009
22.	Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM	8-1-2009	8-5-2014
23.	Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto	8-5-2014	Sekarang

*Sumber: Arsip Kota Makassar*

Selain aktor politik kota makassar tidak terlepas dari aktor ekonomi yang banyak mengambil andil dalam proses perubahan Kota Makassar. Berbagai proyek pembangunan bernilai triliunan hingga miliaran rupiah

sedang giat dirancang dan dibangun di kota makassar. Kebutuhan dana investasi untuk pembangunan didapatkan dengan melibatkan pengusaha nasional dan lokal. Nama pengusaha nasional yang berinvestasi misalnya Yusuf Kalla, Aksa Mahmud, Chairul Tanjung, Ciputra dan lain – lain dan pengusaha lokal misalnya Tandiawan, Hasan Basri, William Tanta, Idris Manggabarani, dan lain – lain.

Pembagian kue pembangunan dari APBN dan APBD, terlihat secara sadar terjadi pembagian dimana mega proyek yang nilainya ratusan miliar hingga triliunan dilaksanakan oleh Grup Kalla dan Grup Bosowa, sedangkan proyek yang bernilai puluhan juta hingga puluhan miliar dilaksanakan oleh pengusaha lokal sulawesi selatan. Pembagian ini terjadi karena adanya perbedaan kekuatan finansial perusahaan, akses terhadap perbankan kemampuan penguasaan teknologi tinggi, akses dan pengaruh politik nasional dan lokal, dal lain – lain. Pengusaha yang memiliki semua kekuatan inilah yang mendapatkan mega proyek sedangkan pengusaha lokal mendapatkan proyek yang lebih nilainya lebih kecil.

Sebagai kota perdagangan dan jasa, maka kota makassar di jejal oleh mall, pusat perbelanjaan, hotel, mall, pusat rekreasi, bandara dan pelabuhan bertaraf internasional, dan lain – lain. Kesemua ini dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah, pengusaha nasional dan pengusaha lokal. Salah satu yang terkenal adalah kawasan Niaga Tanjung Bunga yang mengintegrasikan antara pusat perbelanjaan, sarana hiburan,



restoran, dan apartemen. Trans studio dibangun pada tahun 2007 diatas lahan seluas lebih kurang 24 Ha dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah oleh PT. Trans Kalla Makassar, Perusahaan patungan antara Trans Corporation milik Chaerul Tandjung dan PT. Hadji Kalla milik keluarga Kalla.

- Grup Kalla dan Grup Bosowa

Memasuki kota makassar, kita segera menyadari keberadaan dua perusahaan besar yang mengatur berbagai sendi perekonomian disana. Dua perusahaan tersebut adalah Grup Kalla dan Grup Bosowa. Kehadiran perusahaan ini dimakassar secara simbolik ditunjukkan dengan gedung perkantoran yang dimiliki oleh oleh kedua perusahaan tersebut, Kalla Tower dan Menara Bosowa. Kedua gedung ini terlihat kontras dengan gedung – gedung lain disekitarnya.

PT Hadji Kalla merupakan perusahaan yang menaungi perusahaan lain yang ada dalam Kalla Grup. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1952 dan awalnya bergerak di sektor otomotif dan perdagangan. Dibawah pimpinan Yusuf Kalla, perusahaan ini berkembang menjadi pemain bisnis yang sangat berpengaruh, tidak hanya dimakassar tetapi juga Di Sulawesi Selatan bahkan ditingkat nasional. Saat ini Kalla Grup telah melakukan ekspansi bisnis melampaui sektor bisnis yakni sektor industri (perakitan kendaraan, daging olahan, pakan ternak, trafo), agrikultur, properti, transportasi (perkapalan, peti kemas), konstruksi, pembangkitan tenaga listrik dan lain – lain.

Selain pembangunan empirium bisnis melalui Grup Kalla, Yusuf Kalla juga membangun kekuatan di sektor politik. Yusuf Kalla memulai karir politiknya dari Sulawesi Selatan hingga ketingkat nasional. Tercatat, Yusuf Kalla pernah menduduki jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009, pernah menjabat ketua Partai Golkar, dan berbagai jabatan penting lainnya di politik pemerintahan. Setelah mencapai karir politik yang tinggi di tingkat nasional, posisi Yusuf Kalla dalam situasi politik lokal Sulawesi Selatan terlihat sepintas tidak nampak dan menjadi sebatas tokoh masyarakat atau *pandita guru* yang banyak diminta pendapat dan dukungannya.

Grup Bosowa adalah Grup perusahaan yang didirikan oleh H. M. Aksa Mahmud. Aksa Mahmud Awalnya bekerja Di Kalla Grup namun dia memilih memulai bisnisnya sendiri dengan sejak tahun 1970-an dengan diawali bisnis transportasi dan penyewaan truk. Bakat bisnis, dipadu dengan dukungan pasangan hidup yaitu adik kandung Yusuf Kalla mendorong dia menjadi pengusaha Sulawesi Selatan yang sukses. Aksa Mahmud memulai bisnisnya dengan keluar dari Kalla Grup dan membuka perusahaan distributor mobil Mitsubishi dan kawasan Timur Indonesia, yakni PT. Tiga Berlian. Ternyata Aksa Mahmud berhasil mengembangkan terus sayap bisnisnya diberbagai bidang seperti otomotif, jasa taksi, konstruksi, pabrik semen, perkebunan, properti, pembangkit tenaga listrik dan lain – lain.

Aksa Mahmud seperti juga Yusuf Kalla tidak hanya berkecimpung dalam dunia bisnis. Dia juga masuk dalam dunia politik. Pada tahun 2002 Aksa Mahmud pernah masuk dalam bursa pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, namun tidak berhasil terpilih. Ambisi politiknya kemudian diarahkan ke tingkat nasional dan dia menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2004-2009, dan menjabat sebagai wakil ketua MPR-RI.

- Keluarga Tandiawan

Usaha bisnis keluarga Tandiawan, dimulai dari sang bapak yakni Darwanto Tandiawan sebagai pengusaha hasil bumi melalui UD. Benteng Baru. Salah satu usahanya adalah distributor tepung terigu. Dia mempunyai beberapa anak dan yang terkenal sebagai pengusaha berpengaruh di Kota Makassar adalah Rizal Tandiawan dan Ricky Tandiawan.

Rizal Tandiawan lahir tahun 1963 sebagai anak bungsu keluarga Tandiawan. Pada tahun 1983 bersama dengan kakaknya Ricky Tandiawan, membuka usaha show room kepercayaan H. M. Jusuf Kalla untuk bekerja dengan Toyota. Pada tahun 1990, Rizal Tandiawan diminta sepupunya Jacky Purnama untuk mengelola PT. Sinar Galesong Pratama (SGP), perusahaan distribusi produk resmi Suzuki yang sedang bermasalah.

Setelah PT. SGP sukses, dia merambah ke usaha lain yakni bisnis properti, seperti pasar tradisional modern Mapala, PTC, Hotel Quality,



dan lain – lain. Bersama dengan Ciputra, dia membangun proyek Citra Land Celebes Makassar. Perusahaan yang lain, PT Sinar Indonesia membangun Hotel Swiss Bell Inn Panakukkang. Sedangkan kiprahnya di bidang organisasi sosial , Rizal Tandiawan tercatat sebagai ketua perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) Kota Makassar .

Salah satu proyek prestisius dari Rizal Tandiawan adalah pembangunan Lapangan Golf berkelas internasional bernama Padi Valley, Di Desa Pallantikang dan Desa Pattallassang, pada tahun 2011 dan diresmikan oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo.

Di Kota Makassar Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2012 telah menerima bantuan dari pengusaha lokal kota makassar berupa dana bantuan hibah, pembangunan dan relokasi gedung, serta kendaraan roda empat dari Rizal Tandiawan, Ricky Tandiawan, Willianto Tanta dan Najmah Muin yang sekarang menjadi gedung Polsekta Tamalate.

Pemberian hibah para pengusaha ini ke Polda Sulsel menimbulkan kontroversi di masyarakat makassar. Koalisi LSM Di Kota Makassar mempertanyakan alasan Polda Sulsel menerima hibah tersebut karena beberapa pengusaha tersebut diduga terlibat mafia tanah Di Makassar sehingga independensi kepolisian dapat terganggu ketika menangani sengketa tanah antara rakyat melawan para pengusaha pemberi hibah. Apalagi tanah untuk pembangunan kantor Polsekta Tamalate lahannya

juga masih menjadi sengketa antara Ricky Tandiawan dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).

- Keluarga Gozal

Usaha keluarga Gosal dimulai ketika Tony Gozal atau Go Tiong Kien menjadi pengusaha yang salah satu usahanya adalah distributor utama gula seluruh Kota Makassar dan pemilik utama Golden Hotel (MGH). Pada tahun 80-an, Tony Gozal dikenal sebagai salah satu pengusaha kuat dan kebal hukum di kota Makassar. Tetapi ketika Baharuddin Lopa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel (1982-1986), Tony Gozal divonis bersalah melakukan korupsi. Dampaknya adalah Baharuddin Lopa kemudian di mutasi menjadi staf ahli menteri kehakiman dan saat ini Tony Gozal menjabat sebagai Dewan Penasehat Yayasan Istana Naga Sakti Klenteng Xian Ma.

Anak dari Tony Gozal yang juga dikenal sebagai pengusaha sukses di kota Makassar adalah Peter Gozal atau Wu Shung Han atau Ahan, yang dilahirkan tahun 1960. Saat ini, Peter Gozal memimpin Makassar Golden Hotel (MGH), PT. Pura Persada (perusahaan pemasok peralatan meteran listrik dan air dengan wilayah distribusi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara), Radio Madama, dan Radio Suara Celebes.

Tony Gozal dan Peter Gozal memiliki hubungan dekat dengan tokoh – tokoh Partai Golkar Makassar dan Sulawesi Selatan, bahkan sering dianggap sebagai pendukung finansial Gubernur Sulawesi

Selatan Syahrul Yasin Limpo. Hubungannya sangat dekat terlihat dalam pendirian Radio Suara Celebes, pembelian kepemilikan koran pedoman rakyat, dan lain – lain. Bahkan, dalam Pilkada Gubernur Sulsel tahun 2008 tercatat Peter Gozal, Anton Obey, Yongris menjadi salah satu pendukung Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang dari pihak tionghoa. Di bidang Politik Peter Gozal merupakan kader Partai Golkar yang pernah menjadi pelaksana tugas bendahara di Partai Golkar, anggota bada informasi dan komunikasi Partai Golkar provinsi Sulsel, dan anggota penasehat APINDO Sulsel. Nama Peter Gozal juga pernah tersangkut penggerebekan pengguna narkoba Di Makassar Golden Hotel, tetapi persidangan soal itu tidak di lanjutkan.

- Hasan Basri

Hasan Basri atau biasa pula dipanggil dengan nama bang Hasan adalah seorang pengusaha properti yang terkenal di Sulawesi Selatan. Nama cinanya adalah Tien Shan lahir Di Geser salah satu kecamatan di kabupaten Seram, Maluku. Dalam tulisan di koran lokal Makassar yang penulisnya merupakan mantan ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan aktivis komunitas pemerhati dan penyelamatan lapangan karebosi menggambarkan secara detail proses perjalanan bisnis Bang Hasan. Menurutnya pada era 90-an Bang Hasan membuka usaha perjudian yang menghebohkan Di warung Bang Hasan Jl.Gunung Latimojong lalu pindah ke Jl. Laiya dan terakhir Di Jl. Nusa Kambangan. Usaha judi itu ditutup sejak protes keras dari berbagai



kalangan. Selanjutnya, usahanya beralih ke bisnis entertainment. Akhir 1990-an bisnis barunya ini pun ditutup.

Bang Hasan beralih ke bisnis properti dengan membangun “Mall Karebosi Square” yang lalu berubah nama menjadi Makassar Trade Centre (MTC). Dia kemudian menyewa got tertutup di lapangan karebosi, yang dibangun di depan mall tersebut (Di sisi kanan Jl. Ahmad Yani) yang dibangun dengan nilai 1 miliar rupiah lebih dari APBD Kota Makassar. Melalui perusahaannya PT. Tosan Permai Lestari mengambil lagi bahu dan badan Jl. Nusa Kambangan, disusul Jl. Ahmad Yani dan Jl. HOS Tjokroaminoto. PT. Tosan Permai Lestari kemudian membangun jembatan serba guna yang buntung berlantai empat sebagai tempat usaha.

Sebenarnya dekat kawasan itu Bang Hasan telah menguasai Poliklinik Gigi Pattunuang tepatnya Di Jl. Bulusaraung nomor 1. Melihat semua ini maka hal ini merupakan usaha untuk mengakuisisi lapangan karebosi. Posisi Lapangan Karebosi memang strategis karena berada di titik pusat Kota Makassar atau nol kilometer.

Pada saat ini Bang Hasan telah menjadi pemilik pusat perbelanjaan Makassar Trade Center atau MTC Karebosi, mall bawah tanah Karebosi Link dan pusat grosir modern karebosi yang dulunya merupakan bekas bangunan pusat hiburan odede di Jl. Hos Cokroaminoto). Pada bekas lokasi rumah sakit gigi Pattunuang Makassar, perusahaannya membangun hotel 18 lantai Karebosi

Condotel. Hotel ini memiliki akses langsung dengan MTC/SPM. Sama halnya dengan MTC dibagian bawah hotel dibuat terowongan yang menghubungkan hotel dengan Karebosi Link. MTC Karebosi dan Karebosi Link sudah mejadi satu melalui terowongan yang melintang dibawah Jl. Ahmad Yani. Dengan terwujudnya hal ini maka Bang Hasan mempunyai pusat perbelanjaan dan hotel yang saling terkoneksi tepat dipusat Kota Makassar.

- Jen Tang

Jen Tang atau Soedirdjo Aliman adalah seorang pengusaha yang merupakan pemilik beberapa pom bensin Di Makassar, pengapalan dan distributor BBM ke Indonesia Timur. Jen Tang juga merupakan pengusaha otomotif dan properti. Dia adalah pemilik PT. Jujur Jaya Sakti dan Isuzu Mobilindo Plaza. Pada tahun 2008 bersama dengan Willianto Tanta memnbentuk PT. Makassar Metro Square (PT. MMS) yang kemudian membangun kawasan pusat bisnis Makassar Metro Square di Jl. Gunung Latimojong.

PT. MMS juga membangun sarana memancing Di Kawasan Pantai Buloa yang kemudian digugat oleh puluhan masyarakat buloa. Di kota Makassar Jen Tang dikenal sebagai pengusaha yang banyak terlibat konflik pengusaha yang banyak terlibat konflik tanah baik dengan masyarakat maupun dengan masyarakat maupun dengan pengusaha lainnya. Kontroversi lain dari Jen Tang adalah reklamasi di tepi pantai losari yang lokasinya disamping kantor direktorat polair

polda sulsel atau belakang Zona Kafe di jalan pasar ikan. Rencananya akan dibangun sebuah hotel. Proyek reklamasi pantai di depan Benteng Fort Rotterdam tersebut menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat karena kawasan ini di nilai masuk dana zona penyangga situs Benteng Rotterdam.

- Anton Obey

Anton Obey dikenal sebagai salah satu pengusaha tionghoa sejak dulu bisnisnya mulai dari kontraktor, distributor dan lain – lain. Antony Obey merupakan salah satu pengusaha yang sering ikut proyek dari dana APBD melalui perusahaannya PT. Inaho Jaya Lestari menangani proyek proyek dibidang kesehatan, kedokteran, dan KB di rumah sakit nene mallomo Di Kabupaten Sidrap, Sulsel kurang lebih 14 miliar rupiah pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB di rumah sakit ibu dan anak pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih 1 miliar rupiah.

Antony Obey merupakan anggota Partai Golkar Provinsi Sulsel dimana pada pemilu 2004 maju menjadi calon legislatif untuk DPR tetapi gagal. Dia juga aktif diberbagai lembaga seperti menjadi Ketua Dewan Pendiri Lembaga Investigasi dan Monitoring (LIMIT), Pengurus BPP Ardin, Perhimpunan Tionghoa Sulsel, anggota Penasehat APINDO Provinsi Sulsel, dan lain – lain.

- Willianto Tanta



Willianto Tanta lahir tahun 1963. Ayahnya bernama Arifin Tanto merupakan seorang pengusaha penjualan hasil bumi dan usaha penginapan Marannu Di Kabupaten Mamuju. Usaha ayahnya kemudian membuka usaha konstruksi dengan mendirikan PT.Passokorang yang bergerak di pengadaan sarana dan prasarana umum. Kini PT. Passoroang merupakan usaha pelayanan jasa konstruksi kelas A yang berpusat di mamuju dan telah memiliki aset 500 miliar rupiah.

Selain mengurus PT. Passorokang, Willianto Tanta juga mengelola Marannu. Pada tahun 1996 dia mengambil alih Hotel Radison Di Kota Makassar yang mempunyai aset 70 miliar rupiah dan mengganti namanya menjadi Hotel Quality. Pada tahun 2004 Willianto bersama Raymond Arfandi dan Piter Witono kemudian membangun Hotel Clarion dikawasan Panakkukang. Dunia real etate juga digeluti melalui PT. Mamuju Indah Perkasa yang akan membangun 1000 bangunan hunian Di Daerah Mamuju.

Grup Clarion semakin berkembang dalam bisnis hotel Di Sulsel dan daerah lainnya. Hotel Grup Clarion yang berlokasi di tengah Kota Makassar yaitu Grand Quality Hotel Makassar, Grand Clarion Hotel Makassar, Plaza Quality Hotel Makassar, dan Grand Palace Hotel Makassar. Melalui anak perusahaannya yakni PT. Fajar Phinisi Seaside dan PT Makassar Phinisi Seaside Hotel grup ini akan membangun Grand Clarion Hotel Kendari, Grand Clarion Jakarta,

Grand Clarion Surabaya, Grand Rinra Hotel Makassar, Perintis Hotel Makassar serta Grand Clarion Palu.

Untuk rencana hotel Grand Rinra Hotel Makassar akan dibangun oleh PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada lahan seluas 30.000 meter persegi, diantara Celebes Convention Center (CCC). Komposisi saham hotel yaitu pemprov Sulsel 20% dan PT. Makassar Phinisi 80%.

#### **A.4 Kebijakan Di Kota Makassar**

Di Kota Makassar berbagai Kebijakan yang menggunakan ruang publik atau tanah milik negara harus diatur secara tegas dalam pemanfaatan ruang tersebut. Aturan teknis dan visi misi pembangunan harus tertuang dalam Peraturan Daerah sebagai landasan dalam pembangunan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dalam pembentukan perda tersebut dan tentunya melibatkan DPRD Makassar sebagai perwakilan rakyat dalam mengambil keputusan. 2 kebijakan besar yang menggunakan ruang publik paling besar di kota makassar yaitu alun – alun kota atau Revitalisasi Lapangan Karebosi dan Reklamasi Pantai.

##### **- Revitalisasi Lapangan Karebosi**

Lapangan Karebosi merupakan *Landmark* Kota Makassar yang telah lama dikenal. Dalam perjalanannya, lapangan ini tidak dirawat dengan baik sehingga semakin kehilangan fungsinya. Pada tahun 2007

pemerintah kota makassar mengagas rencana revitalisasi lapangan karebosi. Pemkot membuka tender bagi pengembang yang berminat untuk menawarkan proposal pengembangan lapangan karebosi. Dari proses tender tersebut hanya ada satu perusahaan yang memasukkan proposal, yakni dari perusahaan milik Hasan Basri alias Bang Hasan. Pemkot Makassar memutuskan untuk memenangkan satu – satunya proposal yang masuk tersebut. Proyek tersebut dinamakan Karebosi Link, yang didalamnya terdiri dari proyek peremajaan Lapangan Karebosi, pembuatan area parkir dan mall dibawah permukaan lapangan yang terhubung dengan Makassar Trade Center atau MTC Karebosi yang sudah ada sebelumnya.

Kontrak Revitalisasi Lapangan Karebosi ditandai dengan perjanjian kerjasama Nomor : 426.23/026/S.Perja/Ekbang, Nomor : 074/TPL/X/2007 antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT. Tosan Permai Lestari tentang Bangun Guna Serah dalam rangka revitalisasi Lapangan Karebosi. Perjanjian tertanggal 7 oktober 2007. Objek perjanjian kerjasama ini adalah lapangan karebosi bagian utara yang terletak Di Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar dengan luas kurang lebih 43.965 meter kubik serta terowongan/tunnel dengan luas kurang lebih 1.317 meter kubik yang menghubungkan area perekonomian Lapangan Karebosi dengan MTC Karebosi (Pasal 3).



Sedangkan jangka waktu pengelolaan/penggunaan usaha dengan pola bangun serah guna selama 30 tahun (Pasal 5). Ketika masa 30 tahun ini berakhir, maka dalam pasal 14 ayat 4 menyebutkan “setelah jangka waktu Pasal 5 berakhir, para pihak sepakat meningkatkan perjanjian kerjasama ini dalam bentuk kerjasama pemanfaatan dengan membayar kontribusi tetap ke kas daerah Kota Makassar untuk 30 tahun berikutnya, sesuai peraturan menteri dalam negeri RI No. 17 tahun 2007 dan/atau ketentuan perubahannya.

- Reklamasi Pantai Di Kota Makassar

Peraturan daerah Kota Makassar terkait Reklamasi pantai telah disahkan oleh DPRD Kota Makassar pada tanggal 21 Agustus 2015.

Peruntukan pembangunan di lahan yang direklamasi ini sebagai kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pelabuhan, kawasan industri, kawasan RTH, kawasan perkantoran, kawasan pergudangan dan kawasan energi center sebagai salah satu tujuan pengembangan bisnis.

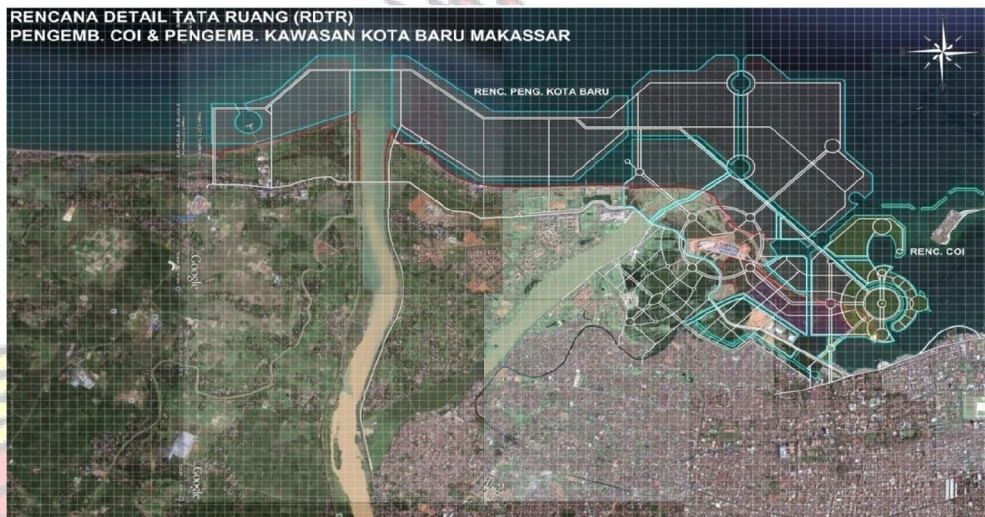
Perda tata ruang dan wilayah (RTRW) di sahkan oleh DPRD dengan memperhatikan poin yang harus dijalankan oleh pemerintah yaitu pertama, seluruh produk reklamasi yang terjadi di makassar adalah tanah milik negara, dikuasai oleh negara dan dikendalikan oleh negara. Kedua, reklamasi hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atas nama pemerintah dan pengendaliannya juga diserahkan ke pemerintah. Ketiga, perda tersebut tidak berlaku surut dan tidak memberikan legitimasi atas seluruh aktivitas yang ada sepanjang garis

pantai kota makassar. Ke-empat, pemberlakuan sanksi pidana tidak hanya orang perorang, badan hukum melainkan pejabat yang berwenang memberikan izin jika melanggar aturan juga akan dikenakan sanksi pidana.

Dalam reklamasi pantai tersebut di butuhkan dana sampai berpuluh – puluh triliun rupiah maka dari pemerintah menggandeng investor dalam pembangunannya. Beberapa investor yang sudah menimbun pantai di kota makassar yaitu PT. Laburino, PT.Vacra Artha Manika, PT. Pelaksana Jaya Mulia, PT. Sinar Amalia Pratama, PT. Asindo, PT. Mariso Indoland, PT. Puncak Bumi Gemilang, PT. Mega Surya Nusa Lestari, PT. Central Cipta Bersama, PT. Kibar Makassar Bisnisland, PT. Bosowa Property, Center Point of Indonesia, PT. GMTD dan lain – lain. Berikut rencana induk Reklamasi Pantai di Kota Makassar :



**Gambar 1. Pengembangan COI**  
**& Pengembangan Kawasan Kota Makassar**



*Sumber : Presentasi Seminar sosialisasi Perpres No.12 Tahun 2012 Di Hotel Grand Clarion, 6 Maret 2013 oleh Danny Pomanto. Hal.129*

**Gambar 2. RDTR Kawasan Reklamasi Utara Makassar**



*Sumber : Presentasi Seminar sosialisasi Perpres No.12 Tahun 2012 Di Hotel Grand Clarion, 6 Maret 2013 oleh Danny Pomanto. Hal.133*



**Gambar 3. RDTR Kawasan Reklamasi Barat Makassar**



*Sumber : Presentasi Seminar sosialisasi Perpres No.12 Tahun 2012 Di  
Hotel Grand Clarion, 6 Maret 2013 oleh Danny Pomanto. Hal.134*

**Gambar 4. RDTR Kawasan Reklamasi Selatan Makassar**



*Sumber : Presentasi Seminar sosialisasi Perpres No.12 Tahun 2012 Di  
Hotel Grand Clarion, 6 Maret 2013 oleh Danny Pomanto. Hal.135*

**Gambar 5. RDTR Kawasan Reklamasi Pesisir Makassar**



*Sumber : Presentasi Seminar sosialisasi Perpres No.12 Tahun 2012 Di Hotel Grand Clarion, 6 Maret 2013 oleh Danny Pomanto. Hal.138*

#### **A.5 Visi Misi Kota Makassar**

VISI Pemerintah Kota Makassar 2014 - 2019

“Mewujudkan Kota Dunia Nyaman Untuk Semua”

sub Visi “Tata Lorong Bangun Kota Dunia”

#### **MISI**

1. Merekonstruksi NASIB RAKYAT menjadi MASYARAKAT SEJAHTRA standar dunia
2. Mereformasi TATA PEMERINTAHAN menjadi PELAYANAN PUBLIK kelas dunia bebas korupsi
3. Merestorasi TATA RUANG KOTA menjadi KOTA NYAMAN kelas dunia



8 jalan masaDPan

8 Jalan Masa depan Menuju Masyarakat sejahtera standar dunia

1. Menuju bebas pengangguran.menciptakan 500 ribu peluang kerja dan bisnis baru dalam kurun 5 tahun.
2. Jaminan Sosial keluarga (Jam Surga) untuk semua.melanjutkan fasilitas IASMO bebas ditambah asuransi jiwa, asuransi kesenatan, asuransi pensiun batuan hukum, bursa kerja infaq & zakat bagi kaum dhuafa.
3. Pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam.gratis periksa dokter, gratis periksa laboratorium mobile, dan gratis abat.
4. Deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah. gratis seluruh biaya, gratis perlengkapan sekolan, gratis transportasi sekolah khusus bagi murid tidak mampu
5. Sampah kitaDIA Tukar Beras.penukaran sampah yang sudah dipilih dengan beras, langsung di lokasi.
6. Training keterampilan gratis dan dana bergulis tanpa agunan.dana bergulis sampai dengan 50 Juta per Kepala Keluarga (KK).
7. Rumah Kota Murah untuk Rakyat Kecil.penyediaan rumah beton layak huni yang disubidi 50 %.
8. Hidup Hijau dengan Kebun Kota. pembuatan kebun hijau produktif secara vertikat pada lorong-lorong seluruh Kota



## 8 Jalan Masa depan Menuju Kota nyaman kelas dunia

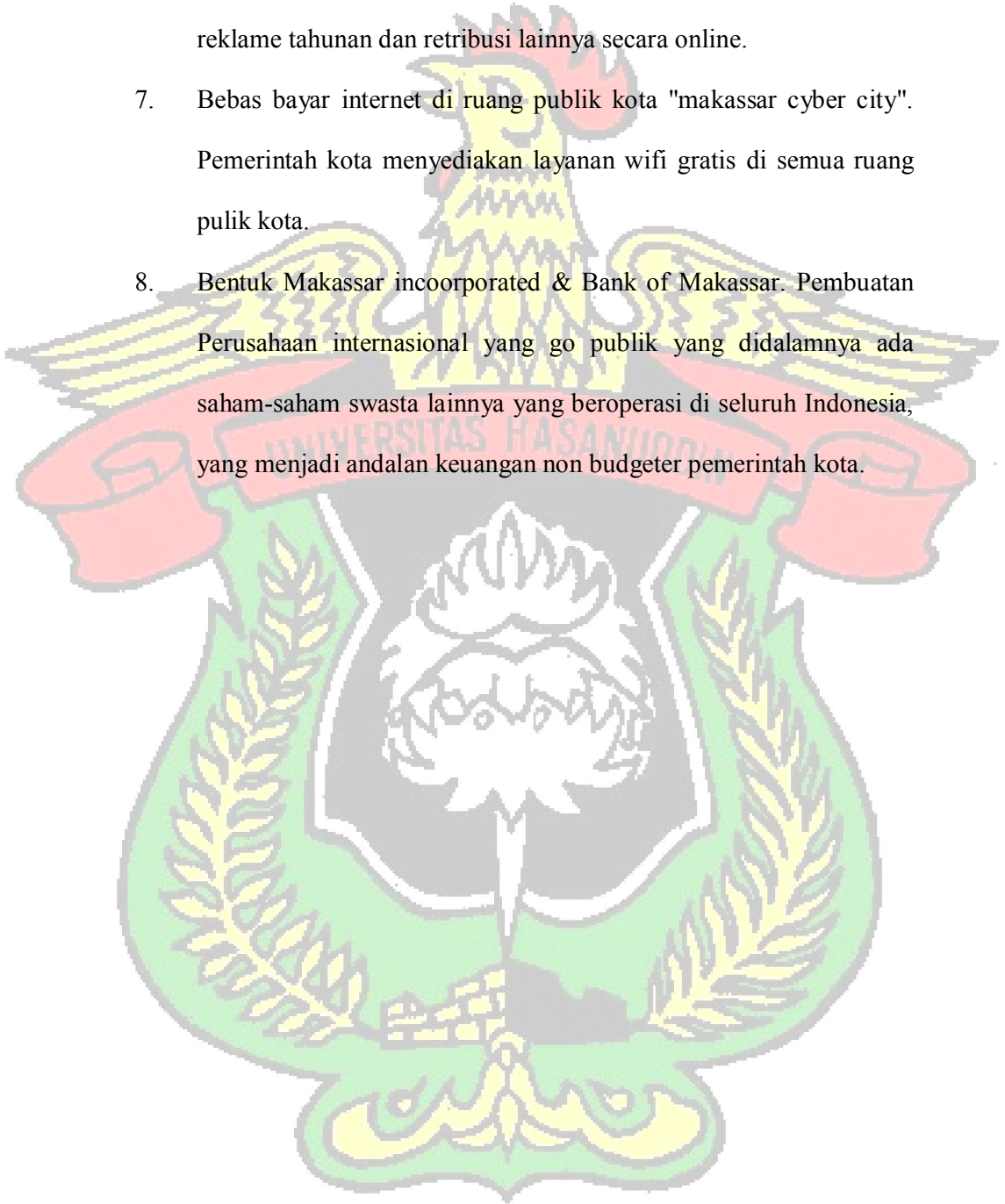
1. Atasi macet, banjir, sampah & masalah perkotaan lainnya. menyelesaikan 8 masalah besar kota makassar secara terpadu dalam 5 tahun.
2. Bentuk Badan Pengendali Pembangunan Kota. pembentukan badan pengendali, (board) independen yang terdiri atas LSM, akademisi, asosiasi profesional, tokoh masyarakat & unsur-unsur masyarakat lainnya dalam 8 tim terpadu.
3. Bangun Water-front City Selamatkan Pesisir dan Pulau-Pulau Makassar. memitigasi seluruh pesisir pantai, pulau, sungai, danau, Kanal dalam suatu perencanaan terpadu.
4. Bangun sistem transportasi publik kelas dunia. sistem intermoda transportasi dimana busway & monorail sebagai transportasi utama, pete-pete sebagai feeder, becak sebagai transportasi lingkungan dengan sistem "one dya one ticket".
5. Lengkapi infra struktur kota berkelas dunia. mempertinggi kualitas infrastruktur yang ada & melengkapl infrastruktur kelas dunia yang belum dimiliki Makassar.
6. Bangun birring kanal City& 8 ikon kota baru lainnya. merevitalisasi koridor kanal, tepian kanal dengan tanpa menggusur mejadi koridor kuliner seafood kota Makassar.

7. Bangun taman tematik.membangun taman-taman berdasarkan tematik "irama, aroma dan warna".
8. Tata total lorong.menata fisik lorong secara total mulal dari sistem sanitasi, air bersih, estetika tampak bangunan, menghijaukan lorong & mendorong tumbuhnya home Industry.

#### 8 Jalan Masa depan Menuju Pelayanan Publik Kelas dunia Bebas Korupsi.

1. Menuju PAD 1 triliun.meningkatkan dan mendptakan 10 BUMD profesSonal, produktif, unggul.
2. Insentif progresif semua aparat RT&RW 1 juta/bulan.mulai dari Eselin II sampai honorer RTRW, imam masjid, pemandi mayat, guru paud dan guru sekolah minggu, kader pos yandu.
3. Kuota anggaran kelurahan 2 miliar/kelurahan/tahun.memberi wewemang kelurahan didalam penggunaan anggaran, 2 milyar dalam 1 tahun yang pelaksanaannnya berdasarkan musrembang tingkat RTRW.
4. Pelayanan publik langsung kenrumah.satu pegawai kota bertanggung jawab melayani langsung ke lingkungan per 500 meter ruas jalan (street government).
5. Fasilitas pelayanan publik terpusat terpadu di kecamatan.semua afasilitas pelayanan publik terpadu terpusat di setiap kecamatan dalam satu ruas jalan (citizen street).

6. Pembayaran pajak & retribusi tahunan online terpadu. Pembayaran PBB, Parkir tahunan, sewa parkir kawasan, sampah tahunan reklame tahunan dan retribusi lainnya secara online.
7. Bebas bayar internet di ruang publik kota "makassar cyber city". Pemerintah kota menyediakan layanan wifi gratis di semua ruang publik kota.
8. Bentuk Makassar incorporated & Bank of Makassar. Pembuatan Perusahaan internasional yang go publik yang didalamnya ada saham-saham swasta lainnya yang beroperasi di seluruh Indonesia, yang menjadi andalan keuangan non budgeter pemerintah kota.





## **BAB V**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan mengembangkan data yang ditemukan mengenai kartel politik di kota makassar dan dampaknya terhadap kekuasaan walikota di kota makassar. Pendeskripsian ini merupakan hasil dari observasi, wawancara, dan beberapa penelitian sebelumnya. Untuk mengetahui kartel politik yang tercipta di kota makassar mampu berimplikasi pada kekuasaan walikota maka penulis merasa perlu mengidentifikasi perkembangan kartel politik yang tercipta di kota makassar melalui kebijakan – kebijakan yang banyak mewadahi kepentingan – kepentingan kelompok tertentu dan banyak melibatkan pemangku jaringan – jaringan besar di kota makassar.

#### **A. Kartel Politik Di Kota Makassar**

Kota makassar sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan daerah sulawesi selatan telah banyak melakukan pengembangan tata ruang wilayah di kotanya dengan tujuan mencapai visi misi dari setiap pemerintahan. Dalam proses pengelolaan ruang publik pemerintah pusat memberikan kekuasaan pada pemimpin daerah untuk menentukan arah perkembangan dan kebijakan setiap daerahnya sesuai dengan amanat undang – undang dasar.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, kota makassar sebagai kota terbesar di kawasan timur indonesia dituntut untuk melakukan pembenahan di sektor fasilitas publik agar lebih memberikan manfaat bagi

masyarakatnya dengan menyediakan ruang publik yang kondusif untuk masyarakatnya.

Pembangunan kawasan kota makassar tertuang dalam peraturan daerah yaitu rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota makassar yang di sahkan oleh DPRD kota makassar dan dilaksanakan oleh pemerintah. Penentuan kawasan tata ruang ini tidak terlepas dari Kartel yang tercipta antara legislatif, eksekutif, dan para investor. Dalam kartel politik semua pihak ingin bersama – sama mendominasi dan mengontrol sumber daya publik sehingga dapat memberikan insentif kepada masing – masing dari anggota kartel tersebut.

Hal tersebut yang dalam observasi yang penulis lakukan menemukan beberapa praktek dimana pemerintah melonggarkan aturan penataan ruang dengan memberi ijin investor membangun kawasan industri di lahan produktif tanpa memperhatikan tujuan dari ruang publik itu sendiri sehingga tercipta privatisasi oleh pihak investor.

Proyek alih fungsi ruang yang banyak melibatkan jaringan – jaringan besar di kota makassar yakni revitalisasi lapangan karebosi dan Reklamasi Pantai Di Kota Makassar yang banyak menuai sorotan dari masyarakat.

#### 1. Revitalisasi Lapangan Karebosi

Revitalisasi Lapangan karebosi merupakan pengelolaan ruang publik yang di lakukan pada kepemimpinan Walikota Ilham Arif Sirajuddin pada periode pertama kepemimpinannya. PT. Tosan Permai Lestari sebagai investor yang membangun dan mengelola lahan sampai batas 30 tahun. Privatisasi oleh PT. Tosan Permai Lestari tidak hanya

mengalihfungsikan area resapan air menjadi area komersil, tetapi juga kemudian menimbulkan masalah sosial karena fungsi karebosi sebagai ruang publik perlahan – lahan dihilangkan mengikuti kemauan investor.

Revitalisasi Lapangan Karebosi oleh PT. Tosan Permai Lestari milik Bang Hasan sempat menimbulkan polemik di kalangan akademisi, budayawan, media dan berbagai LSM di Kota Makassar . selain karena kedekatan walikota dengan Bang Hasan tetapi juga PT.Tosan Permai Lestari juga merupakan pemilik dari MTC Karebosi dan hotel yang sementara dibangun pada saat itu namun kedua asetnya tersebut terkendala ruang parkir yang tidak memadai maka dari itu berbagai asumsi masyarakat menganggap telah ada “Kong Kalikong” antara Walikota dan Bang Hasan. Asumsi itu diperkuat dengan pendaftar dan pemenang tender satu satunya adalah PT. Tosan Permai Lestari serta dalam desain bangun Revitalisasi Karebosi terdapat ruang bawah tanah sebagai ruang parkir dan mall yang terhubung dengan MTC Karebosi dan Karebosi Condotel.

Sejak awal pengelolaan lapangan karebosi yang di rencanakan oleh Ilham Arif Sirajuddin telah banyak menuai sorotan dari masyarakat karena dianggap dengan terlibatnya pihak investor dalam pembangunannya maka ruang publik tersebut akan berubah menjadi ruang privat. Sorotan tersebut di lakukan oleh banyak LSM di kota makassar dalam perancangan PERDA terkait revitalisasi Lapangan kepada anggota DPRD kota makassar dengan pertimbangan dampak



kepada masyarakat dan alih fungsi lahan. Namun PERDA tersebut tetap disahkan tetapi harus sesuai dengan hasil pembahasan dalam rapat paripurna.

Anggota DPRD yang bertindak sebagai wakil rakyat dan wakil partai tidak mendengarkan aspirasi rakyat dengan tetap mensahkan revitalisasi lapangan karebosi. Padahal kenyataannya posisi pemerintah dalam penguasaan lapangan karebosi menjadi sangat lemah dengan perjanjian MOU dengan PT. Tosan Permai Lestari sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Tosan Permai Lestari dalam pengembangannya.

Pada saat itu yang paling mendukung revitalisasi karebosi adalah partai golkar dan demokrat. Menjadi hal yang wajar ketika mereka mendukung karena Ilham Arif Sirajuddin sempat menjadi kader Partai Golkar berpengaruh dan Ilham Arif Sirajuddin juga merupakan ketua DPP Partai Demokrat. Jadi ketika partai golkar dan demokrat mendukung Ilham Arif Sirajuddin itu semata – mata bertujuan untuk menjaga kelangsungan kolektif partai apalagi yang mengajukan Perda adalah kader dari partai itu sendiri.

PT. Tosan Permai Lestari telah melakukan pembangunan sedangkan dokumen AMDALnya saja belum rampung, telah terjadi penawaran penyewaan atau penjualan ruang – ruang yang akan dibangun di bawah tanah melalui iklan sedangkan dalam MOU yang dilakukan pemerintah dan PT. Tosan Permai semua lahan tersebut seharusnya

menjadi milik pemerintah namun hingga sekarang ruang bawah tanah lapangan karebosi yang terdiri dari ruang parkir dan Karebosi Link tidak jelas kepemilikannya. Ruang diatas lapangan karebosi seharusnya tidak ada lahan privat, namun sekarang telah banyak bangunan yang menyalahi MOU. Seharusnya tidak ada pungutan biaya parkir namun yang terjadi tidak sesuai, bahkan hasil lahan parkir tersebut masuk ke kas pengelola bukan pemerintah.

Melihat hal tersebut maka berbagai pihak berusaha untuk mengamankan proyek tersebut. Hal ini sejalan dengan konsep kartel politik bahwa dalam kartel politik tercipta sebuah sistem yang kolusif dimana tercipta inklusi dikalangan elit yaitu pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar kemudian mendukung proyek yang jelas melanggar banyak aturan dan pada sistem ini yang dirugikan adalah masyarakat makassar itu sendiri.

Area yang ditempati Karebosi Link di bawah tanah hingga sekarang belum memiliki surat legalitas HPL yang artinya PT.Tosan Permai tidak memiliki hak untuk mempersewakan ruang – ruang kepada pihak ketiga dan HPL pun tidak mungkin diterbitkan karena dalam perundang – undangan belum ada HPL untuk ruang bawah tanah (underground) begitu pula untuk lahan atas karebosi HPL pun belum di terbitkan sehingga seharusnya tidak ada aktivitas komersil di kawasan tersebut karena masih dalam status quo sehingga melihat hal tersebut

maka pemerintah dan DPRD melakukan pembiaran terhadap pelanggaran – pelanggaran yang terus dilakukan pihak investor.

Pemerintah kota makassar tidak melakukan tindakan dalam fungsinya sebagai pengawas terhadap pengelola dimana pemerintah terkesan menutup mata dengan bangunan – bangunan baru yang terus bermunculan diatas lapangan karebosi yang secara hukum hal itu illegal jadi tidak salah jika masyarakat menyatakan bahwa pemerintah menjual lapangan karebosi kepada pengusaha karena sekarang ini lapangan karebosi yang seharusnya menjadi alun – alun kota justru menjadi lahan komersil yang bukan milik masyarakat namun milik investor.

Penulis melihat bahwa banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola justru tidak mendapat reaksi yang tegas dari pemerintah dan DPRD kota makassar dimana justru dari sejak awal pembangunan segala izin dan pengelolaan justru di permudah oleh pemerintah dan DPRD dalam hal ini optimalisasi peran dan fungsi kontrol sebagai institusi formal wakil rakyat demi kepentingan publik, dalam pelaksanaan revitalisasi semestinya semakin di perkuat melalui keputusan politik para elitnya dengan memerhatikan keseluruhan aspek terkait namun hal itu tidak tercipta.

Dalam kartel politik suatu jaringan akan tercipta apabila mereka mendapatkan insentif dari hal tersebut. Insentif tersebut dapat berupa finansial, jabatan, kekuatan politik, dan lain sebagainya. Di Kota Makassar dalam beberapa tulisan menunjukkan bahwa terdapat



pembagian insentif yang tercipta dikalangan elit yang terlihat dalam berbagai gugatan oleh lembaga – lembaga masyarakat.

Permasalahan yang timbul tersebut mendorong terciptanya Citizen Law Suite (CLS) yaitu gugatan terkait kebijakan pemerintah kota makassar merevitalisasi karebosi ke Mahkamah Agung (MA) terkait bentuk gugatan yang dilayangkan ke pemerintah kota makassar atas dugaan penjualan lapangan karebosi namun hakim pengadilan negeri makassar menolak gugatan tersebut. Hakim ketua Ohan Burhanuddin bersama majelis anggota Yulman dan Syarifuddin Umar, saat itu menilai revitalisasi karebosi memiliki dasar hukum yang jelas.

Namun sepakatnya pemerintah, DPRD dan Pengadilan kota makassar terkait telah tepatnya langkah yang dilakukan oleh Ilham Arif Sirajuddin tersebut tidak mendapat dukungan dari masyarakat dan LSM hingga hal ini sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LP-sibuk, LBH Makassar, Perak, YLBHI Jakarta, serta Indonesian Corruption Wacth (ICW) sebagai LSM yang melaporkan bahwa revitalisasi karebosi ini sarat unsur tindak pidana korupsi dan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Ilham Arif Sirajuddin dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- a) Berdasarkan peraturan pemerintah No.6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan pemendagri No. 17 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah pasal 27 ayat (1) maka tindakan pemerintah kota makassar

dengan melakukan perjanjian kerjasama bangun guna serah dengan PT . Tosan Permai Lestari, di duga di lakukan penunjukkan langsung dan tanpai melalui proses tender atau lelang. Hal ini menyalahi Perpres 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 3 mengenai prinsip dasar (efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel). Selanjutnya permendagri No. 17 tahun 2007 pasal 14 “penetapan mitra bangun guna serah di laksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang – kurangnya lima peserta/peminat.

b) Sebelum perjanjian kerjasama antara pemerintah kota makassar dengan PT. Tosan Permai Lestari di lakukan, pemkot makassar telah mengucurkan anggaran APBD untuk biaya konstruksi dalam pengerjaan lapangan karebosi per 31 Desember tahun anggaran 2006. Dengan uraian :

- Pekerjaan penataan karebosi RP. 1.169.354.050,-00
- Pekerjaan pengawasan penataan karebosi Rp. 47.720.000,-00

Sementara dalam pengerjaan lapangan karebosi dengan total anggaran 1.217.074.050,-00 diatas sama sekali tidak ditemukan perubahan fisik yang dapat di pertanggung jawabkan.

c) Pihak Pemkot justru melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Tosan Permai Lestari untuk mega proyek revitalisasi lapangan karebosi Nomor : 426.23/026/S.PERJA/EKBANG dan nomor : 074/TPL/X/2007, antara pemerintah kota makassar dengan PT. Tosan Permai Lestari tentang bangun guna serah dalam rangka revitalisasi lapangan karebosi tertanggal 11 Oktober 2007.

d) Hasil audit badan pemeriksa keuangan republik indonesia semester 1 tahun anggaran 2007 nomor : 25a/HP/XIV.MKS/04/2007, telah menemukan ketidakpatuhan atas ketentuan atas ketentuan perundang – undangan dalam laporan hasil pemeriksaan kepatuhan tertanggal 9 april 2007, dengan dasar pemeriksaaan pasal 31 UU No. 17/03 tentang keuangan negara, pasal 56 UU No 1/04 tentang perbendaharaan negara, pasal 2 UU No 15/04 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pasal 1 UU No 15/06 tentang BPK, rencana kegiatan pemeriksaan BPK-RI tahun anggaran 2007.

e) Berdasarkan perjanjian kerjasama dengan PT Tosan Permai Lestari untuk mega proyek revitalisasi lapangan karebosi nomor : 426.23/026/S. PERJA/EKBANG dan nomor :



074/TPL/X/ 2007, Antara pemerintah kota makassar dengan PT. Tosan Permai Lestari tentang bangun serah dalam rangka revitalisasi lapangan karebosi, tertanggal 11 oktober 2007. Perjanjian tersebut secara hukum hanya mengikat para pihak dan itu berarti perjanjian tersebut tidak dapat mengikat publik. Dengan demikian perjanjian tersebut telah memberi keuntungan kepada pihak kedua dan sangat jelas bahwa pemerintah kota makassar telah membuat keputusan yang memperkaya orang lain dan melawan hukum.

- f) Tindakan pemerintah kota makassar melakukan perjanjian kerjasama tentang bangunan serah dengan PT. Tosan Permai di duga kuat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pemerintah kota makassar tidak memiliki alas hak atas tanah yang dikenal dengan nama lapangan karebosi yang menjadi objek belum menjadi milik daerah (aset daerah) pemerintah kota makassar. Telah menyalahi syarat dan peruntukan dari fasilitas untuk kepentingan umum menjadi fasilitas bisnis yang dikomersialisasikan.

Tiga fraksi di DPRD Kota Makassar yang sempat menolak Revitalisasi Karebosi adalah fraksi keadilan sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan. Tetapi sejalan dengan semakin berkurangnya pengawasan dari LSM dan masyarakat

Revitalisasi terus berlanjut dan suara penolakan dari anggota DPRD pun menghilang.

Dalam PERDA tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Makassar terbaru yang disahkan pada tahun 2015 bulan Agustus pun Anggota DPRD merekomendasikan agar “menjadikan karebosi yang berada diatas sebagai kawasan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau dan sekaligus tidak dijadikan kawasan bisnis/perdagangan (Pasal 21)”. Artinya berdasarkan hal tersebut penulis melihat bangunan beberapa restoran diatas karebosi tersebut telah melanggar peraturan , harusnya ada tindakan nyata dari pihak dinas dengan melakukan pembongkaran paksa seperti halnya ketika pemerintah mengusir tempat tinggal masyarakat makassar yang dialihkan ke rusun terkait namun sampai sekarang dan telah bertahun tahun berada diatas lahan tersebut pemerintah tidak melakukan tindakan tegas atau pemerintah tidak melakukan pengawasan pada PT.Tosan Permai Lestari dan perkembangan ruang publik tersebut.

Dari rekomendasi DPRD tersebut pun mengamanatkan untuk menjadikan Lapangan Karebosi sebagai Ruang Terbuka Hijau namun kenyataanya Lapangan Karebosi tidak bisa lagi di tumbuhi pohon karena dibawah tanah tersebut terbangun kurang lebih 300 kios dan parkirannya sehingga tidak mungkin melakukan penanaman pohon lagi diatas lapangan karebosi. Jadi rekomendasi tersebut jika dijalankan penulis melihat bahwa pemerintah harus melakukan penanaman pohon dan menjadikan kembali

ruang bawah tanah tersebut sebagai wilayah resapan air dan tanah tanam. Namun janganakan menjadikannya sebagai ruang terbuka hijau kembali melakukan pengawasan terhadap bangunan yang bermunculan diatas karebosi saja mereka tidak mampu apa lagi sampai mengubah lahan bawah tanah yang tidak memiliki HPL itu.

Penulis melihat hukum Di Kota Makassar menjadi sangar rumit ketika harus berhadapan dengan pengusaha dan pemegang dana besar pada hal mereka jelas memiliki hak dan tugas untuk memberikan sanksi kepada yang melakukan pelanggaran. Berbeda ketika mereka berhadapan dengan masyarakat kecil Di Kota Makassar petinggi petinggi lembaga pemerintahan, DPRD, dan penegak hukum menjadi sangat tegas bahkan terkadang tidak mempertimbangkan keberlangsung masyarakatnya. Seperti beberapa penggusuran masyarakat mariso dan buloa mereka digusur dengan paksa dan beberapa dari mereka dialihkan ke rusun namun mereka diharuskan membayar 17.000.000,00 rupiah sebagai uang sewa jika tidak mereka tidak bisa tinggal yang di mulai pada pemerintahan Danny Pomanto pada hal rusun awalnya merupakan bangunan yang gratis.

Kartel politik memang pada akhirnya akan menciptakan eksklusi pada masyarakat dan inklusi pada mereka yang mampu menjamin keberlangsungan kepentingan masing – masing mereka. Di dalam kartel politik kebijakan dapat mengikuti kemauan dari anggota kartel sedangkan



yang lain akan membantu mengamankan selama mereka mendapatkan keuntungan pula didalamnya.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia menemukan bahwa juri sayembara desain karebosi tidak menemukan adanya pembangunan ruang bawah tanah yang berdasarkan perjanjian pemerintah seharusnya memperoleh nilai kontribusi dari lapangan karebosi dari pihak swasta selama 30 tahun hanya 531.379.715,32 sedangkan nilai investasi yang didapatkan oleh pihak swasta jauh lebih besar dari angka tersebut.

**Tabel 5. Nilai Kontribusi Pengelolaan Lapangan Karebosi oleh pihak swasta ke Pemerintah Kota Makassar**

No.	Tahun	Jumlah
1	2008	Rp.10.379.715,32
2	2009	Rp.12.000.000,00
3	2010	Rp.12.000.000,00
4	2011	Rp.12.000.000,00
5	2012	Rp.12.000.000,00
6	2013	Rp.12.000.000,00
7	2014	Rp.14.000.000,00
8	2015	Rp.14.000.000,00
9	2016	Rp.14.000.000,00
10	2017	Rp.15.000.000,00
11	2018	Rp.15.000.000,00
12	2019	Rp.15.000.000,00
13	2020	Rp.17.000.000,00
14	2021	Rp.17.000.000,00
15	2021	Rp.17.000.000,00
16	2023	Rp.20.000.000,00
17	2024	Rp.20.000.000,00
18	2025	Rp.20.000.000,00
19	2026	Rp.20.000.000,00
20	2027	Rp.21.000.000,00
21	2028	Rp.21.000.000,00
22	2029	Rp.21.000.000,00

23	2030	Rp.22.000.000,00
24	2031	Rp.22.000.000,00
25	2032	Rp.22.000.000,00
26	2033	Rp.22.000.000,00
27	2034	Rp.23.000.000,00
28	2035	Rp.23.000.000,00
29	2036	Rp.23.000.000,00
30	2037	Rp.23.000.000,00
<b>Total</b>		<b>Rp.531.379.715,32</b>

Sumber : MOU nomor : 426/026/S.Perja/Ekbbang, Nomor: 074/TPL/X/2007

Selain itu beban listrik harus ditanggung oleh pemerintah, sehingga dari hal tersebut penulis melihat jelas yang diuntungkan adalah pihak investor justru pemerintah mengalami kerugian ditambah lagi lahan parkir yang seharusnya diperuntukkan untuk pengguna ruang publik justru menjadi lahan parkir untuk pengguna MTC Karebosi, Karebosi Link, dan Karebosi Condotel yang kesemuanya adalah milik dari pengusaha properti Hasan Basri atau Bang Hasan. Anggota DPRD basdir, SE menyatakan :

*“Bang Hasan memang seenaknya saja. Sudah jelas – jelas bahwa ruang yang berada diatas karebosi adalah ruang publik, justru dikomersilkan semaunya dengan mengabaikan aturan. Bukan Cuma itu, Hotel disamping MTC Karebosi itu juga tidak punya lahan parkir sendiri dan kendaraan diarahkan ke parkir KAREBOSI Link juga, inikan aneh”*.<sup>17</sup>

Revitalisasi Lapangan Karebosi sudah berjalan 8 tahun dan telah banyak perubahan dari rencana awal pembangunan oleh pemerintah. Di bagian atas lapangan karebosi telah terbangun Wendy's, Coffen Bean, dan Texas Chicken. Namun keberadaan bangunan tersebut jelas illegal dari pihak DPRD sendiri telah melakukan pemanggilan kepada PT.Tosan

<sup>17</sup> Wawancara Basdir, SE . 21 agustus 2015

Permai Lestari namun belum ada respon dari pihak PT.Tosan Permai Lestari. Hal ini didukung oleh pendapat dari beberapa anggota DPRD salah satunya Basdir, SE yang menyatakan :

*“Selama ini pihak pengelola terlalu diberi ruang oleh pemerintah sehingga bebas membangun semaunya dengan kekuatan uang yang dimiliki. Masalahnya baik Karebosi Link maupun Condotel Karebosi, terbukti melanggar ruang publik yang lahan parkirnya di gabung dibawah lapangan karebosi”*.<sup>18</sup>

Selama ini pemerintah tidak melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT. Tosan Permai Lestari selaku penanggung jawab pengelola. Sejak kepemimpinan Ilham Arif Sirajuddin hingga Danny Pomanto bangunan – bangunan tersebut masih tetap ada malah semakin bertambah. Melihat permasalahan tersebut maka basdir menyarankan kepada walikota untuk segera mengambil sikap kepada PT.Tosan Permai Lestari :

*“Jangan dibiarkan pengelola bandel seperti itu, kalau membangun semaunya saja ditengah kota, itu sama saja memancing tindakan yang sama oleh pengusaha lainnya. Meskipun mereka punya sumbangan besar terhadap pendapatan daerah, tetapi kan tidak serta merta harus mengabaikan aturan”*.<sup>19</sup>

Namun setelah 2 bulan rekomendasi dari DPRD Danny Pomanto dan dinas – dinas terkait belum melakukan apapun. Bagaimana pola seperti ini mampu bertahan dalam berbagai kasus di kota makassar. Sepertinya hukum tidak memberikan kewenangan kepada mereka untuk bertindak tegas seperti halnya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha – pengusaha besar di kota makassar.

---

<sup>18</sup> Ibid, 21 Agustus 2015

<sup>19</sup> Ibid, 21 Agustus 2015



Pengelola PT. Tosan Permai Lestari bahkan tidak tersentuh sedikitpun dari aparat hukum pada hal jelas mereka telah melakukan pelanggaran. Dari sejak kepemimpinan walikota Ilham Arif Sirajuddin hingga Danny Pomanto mereka tetap mampu menggunakan lahan publik dan membangun sesuka mereka. Hal ini hanya mampu bertahan ketika mereka mendapatkan keuntungan dari hal tersebut sehingga mereka tidak akan mengganggu pengembangan yang dilakukan pihak terkait.

Berbagai pihak Di Kota Makassar mulai dari Pemerintah Kota, Penegak Hukum, DPRD Kota Makassar, dan pengusaha mereka kesemuanya berusaha untuk mengamankan agar kebijakan dapat terus bertahan. Kenyataan ini menunjukkan mereka tentunya mempunyai tujuan tertentu dalam hal tersebut. Dengan banyaknya pelanggaran hukum namun revitalisasi tersebut masih bertahan hingga sekarang menunjukkan kartel tersebut memang benar – benar mengamankan agar kepentingan kolektif mereka dapat bertahan sedangkan masyarakat kota makassar telah kehilangan ruang publik.

Pada akhirnya dalam kartel politik memang tercipta inkulisi di kalangan elit dimana mereka akan terus bersama – sama untuk mengontrol sumber daya publik agar dapat memenuhi kepentingan kolektif mereka. Sedangkan untuk masyarakat yang tercipta adalah eksklusi dimana dari perilaku elit tersebut tentunya akan merugikan masyarakat.

## 2. Reklamasi Pantai Di Kota Makassar

Semakin berkurangnya lahan di kota makassar untuk pembangun pemerintah kota makassar melakukan perencanaan pengembangan lahan dengan melakukan reklamasi pantai losari sebelumnya namun itu tidak mampu mewakili terpenuhinya ruang publik untuk makassar maka dari itu dilakukan reklamasi besar - besaran lagi di kota makassar. Namun yang menjadi permasalahan adalah reklamasi telah di lakukan oleh beberapa investor sedangkan aturannya saja belum ada atau dengan kata lain reklamasi yang sudah terlanjur berlangsung dibuatkan aturan untuk menjadi legal. Seperti yang dinyatakan oleh anggota DPRD dan anggota Pansus RTRW dari Partai Demokrat menyatakan :

*“Seharusnya pemerintah menghentikan semua proses reklamasi yang sementara berjalan karena kegiatan tersebut ilegal. Bagaimana mungkin reklamasi sudah dijalankan sedangkan RTRW saja belum di sahkan oleh DPRD”<sup>20</sup>*

Seperti halnya perda yang telah disahkan pada rapat PARIPURNA 21 agustus 2015 maka dengan itu segala aktifitas reklamasi baik yang baru akan di mulai atau yang dilanjutkan telah legal di mata hukum sehingga permasalahan sebelumnya dianggap selesai maka dari itu perda tersebut dinyatakan tidak berlaku surut. Melihat hal itu penulis melihat bahwa salah satu kebijakan yang paling banyak menampung kepentingan elit – elit adalah kebijakan tentang rancangan tata ruang wilayah (RTRW) dimana kebijakan – kebijakan yang kemudian menyesuaikan pembangunan dan bahkan karena proses reklamasi telah berlangsung sedangkan perda

---

<sup>20</sup> Wawancara, Basdir 21 Agustus 2015

belum ada itu menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tercipta untuk melegalkan dan mengakomodasi kepentingan pengusaha dimana pemerintah dan DPRD sebagai alat untuk mensahkan kegiatan tersebut relasi ini tentunya memperlihatkan sistem kolusif yang tercipta di kota makassar perizinan yang di “ada-adakan” dan tidak adanya tindak tegas dari aparat hukum. Pada akhirnya yang paling di rugikan dengan kebijakan tersebut adalah masyarakat kota makassar itu sendiri dan yang diuntungkan adalah pengusaha. Hal ini didukung oleh pernyataan Basdir, SE :

*“Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2015-2035 terkesan bahwa terdapat ambisi pengusaha yang sangat besar untuk menguasai lahan – lahan yang sudah direklamasi maka dari itu kami sebagai Panitia Khusus (Pansus) sepakat bahwa semua yang direklamasi harus kembali menjadi milik pemerintah bukan swasta, namun keterlibatan swasta hanya sebatas kerjasama”.*<sup>21</sup>

Penimbunan yang menuai banyak sorotan dari masyarakat adalah reklamasi yang dilakukan oleh PT. Mariso Indoland secara ilegal dilahan kurang lebih 30.000 meter persegi di depan RS. Siloam. Yang belum mengantongi izin yang legal. Namun kegiatan tetap di lakukan dengan alasan telah memiliki izin prinsip dari pemerintah dan hal itu dibenarkan oleh Kasubid. Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar yaitu Denny Hidayat dalam penelitian terkait pengawasan pelaksanaan perizinan reklamasi pantai Di Kota Makassar pada saat itu.

---

<sup>21</sup> Ibid, 21 Agustus 2015



Penulis melihat bahwa pemerintah pada saat itu pun sebenarnya tidak boleh mengeluarkan izin prinsip yang mengacu pada perda tahun 2006 tentang reklamasi karena perda itu hanya ditujukan untuk reklamasi pantai losari saja sehingga tindakan pemerintah dengan memberikan izin prinsip itu melanggar hukum karena tidak ada aturan yang membolehkan mereka mengeluarkan izin tersebut. Bahkan meskipun demikian tidak ada satu pemerintah atau pun penegak hukum yang menghentikan proses reklamasi tersebut semuanya hanya sebatas teguran.

Tidak hanya PT. Mariso Indoland yang melakukan pelanggaran Pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) oleh PT. Ciputra Surya yang menggandeng PT.Yasmin Bumi Asri juga melanggar aturan yang sama namun masih mampu bertahan. CPI merupakan megaprojek pemerintah Sulsel yang awalnya akan dibiayai APBN dan APBD namun pemerintah pusat menolak dan gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengalihkan pendanaan ke investor.

Reklamasi ini memang banyak melibatkan investor beberapa juga yang sudah melakukan penimbunan yaitu PT.Laburino, PT. Vacra Artha Manika, PT. Pelaksana Jaya Mulia, PT. Sinar Amali Pratama, PT.Asindo, PT. Puncak Bumi Gemilang, PT. Megasurya Nusalestari, PT. Central Cipta Bersama, PT. Kibar Makassar Bisniland, PT. Bosowa Properti, PT. GMTD dan lain – lain. Kesemuanya tersebut telah melakukan proses reklamasi sedangkan perda belum disahkan.

Reklamasi yang terjadi di kota makassar menuai penolakan dari masyarakat karena banyak merugikan masyarakat pesisir dengan adanya penggusuran, hilangnya mata pencaharian dan rusak ekosistem laut. Namun kenyataan tersebut tidak merubah keputusan pemerintah untuk tetap melakukan reklamasi disepanjang pantai Kota Makassar. Kebiasaan buruk pembangunan Di Kota Makassar adalah mengakali Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Idealnya pembangunan dilakukan berdasarkan analisis dampak lingkungan tetapi yang terjadi AMDAL menyesuaikan pembangunan. Akhirnya Amdal Di kondisikan sesuai kehendak pembangunan atau keinginan investor.

Hal yang berbeda di sampaikan oleh Danny Pamanto dalam seminar sosialisai perpres, presentasi yang dilakukan di Grand Clarion pada tahun 2012 menunjukkan bahwa secara AMDAL reklamasi tidak akan berdampak buruk pada masyarakat. Namun kenyataannya dalam prosesnya saja telah banyak masyarakat yang digusur dan kehilangan mata pencahariannya selain itu ekosistem laut mengalami perubahan hal ini berdasarkan analisis yang dilakukan oleh LSM. Maka dari itu pada saat keterpilihannya Danny Pomanto mengajukan perda kepada DPRD untuk melakukan Reklamasi di sepanjang pantai Makassar untuk mendukung pembangunan Kota Makassar. Hal ini didukung oleh pendapat dari Wakil Walikota Makassar Syamsu Rizal :

*“Tahap ini simultan semuanya, jadi bukan hanya soal dampak sosialnya saja juga dampak ekonomisnya setelah itu harus dilihat dampak ekologisnya yang harus diperhatikan dan termaktub dalam 13 syarat teknisnya yang disesuaikan dengan*

*rencana tata ruang lainnya. Sesuai asas hukumnya perda ini tidak boleh berlaku surut maka proses akan terus dipertimbangkan. RTRW ini pun masih butuh banyak penjelasan jadi ada rencana detail tata ruang, rencana teknis kawasan, berarti juga akan disesuaikan dengan kondisinya dan interpretasinya”.*<sup>22</sup>

Banyak penguasa – penguasa kota makassar yang terlibat menyebabkan tindakan tegas tidak tercipta kepada pengusaha – pengusaha tersebut padahal mereka jelas melakukan tindakan melawan hukum. tapi penegak hukum dan dinas – dinas terkait tidak melakukan tindakan tegas dengan menghentikan proses reklamasi.

Sejak awal Golkar dan Demokrat sangat mendukung reklamasi di kota makassar. Pada pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin berdasarkan perda tahun 2006 telah dilakukan penimbunan di GMTDC, Akarena, dan GTC. Dalam prosesnya Danny Pomanto sebagai konsultan reklamasi telah membuat master plan yang lebih luas dari awalnya dan juga menambah CPI di dalam master plannya. Golkar dan Demokrat tentu akan mendukung setiap usulan dari Ilham dan Danny karena mereka merupakan wakil partai dalam pemerintah yang akan memenuhi kepentingan kolektif partai.

Nilai investasi dari reklamasi pantai Di Kota Makassar memang sangatlah besar hingga ini menyebabkan terjadinya perebutan antara pemerintah Kota Makassar dan Pemenrintah Provinsi terhadap klaim wilayah tersebut namun yang terjadi adalah pembagian wilayah dimana

---

<sup>22</sup> Wawancara Syamsu Rizal, 21 Agustus 2015



proyek CPI yang rencana pembangunannya 157 Ha akan di berikan ke Pemerintah Provinsi dan sisanya diberikan kepada pemerintah kota.

Ambisi Syahrul Yasin Limpo untuk membangun istana negara di sulawesi selatan ini telah dilakukan Di Kota Makassar, dimulai dengan usaha yang diajukannya ke pemerintah pusat namun pemerintah ditolak, meskipun demikian proyek tersebut tetap dijalankan dengan menggunakan APDD provinsi sebesar 46 Miliar. Equilibrium center point of indonesia dalam pembangunannya ternyata membutuhkan dana yang sangat besar maka dari syahrul yasin limpo memutuskan untuk bekerjasama dengan Ciputra untuk mendanai, tentunya pihak ciputra mencari keuntungan dalam investasinya tersebut. Pemerintah provinsi mendapatkan lahan 50 Ha sedangkan Ciputra mendapatkan 107 Ha. Kembali lagi dalam kartel politik tentunya insentif akan tercipta dalam setiap deal – deal yang terjadi diantara anggota kartel.

Ciputra dalam posisinya sebagai investor memberikan kuasa pada PT. Yasmin untuk menimbun dan mebangun lahan namun dalam prosesnya PT. Yasmin berusaha untuk menjadikan lahan tersebut menjadi milikn. Dalam prosesnya Najmiah sebagai Direktur dan Penanggung jawab PT. Yasmin di penjarakan dengan alasan oleh Syahrul Yasin Limpo bahwa mereka tidak memiliki alas hukum pada hal ciputra pun tidak memiliki alas hukum tapi masih bisa melakukan penimbunan. Maka dari itu penulis melihat terjadi keanehan dari perilaku pemerintah yang

menunjukkan ketika kepentingan pemerintah di usik maka terjadilah hal demikian.

DPRD Kota Makassar dalam fungsinya untuk menilai setiap ajuan kebijakan yang berasal dari Pemerintah Kota Makassar seharusnya berusaha mempertimbangkan nasib dari masyarakat pesisir dan mata pecaharian mereka belum lagi dampaknya pada ekosistem namun mereka hanya berpendapat bahwa selama mereka diberdayakan itu tidak masalah.

Oleh Basdir, SE :

*“Silahkan melakukan pembangunan kami bukan lembaga yang anti pembangunan tetapi pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan yang tidak membunuh perekonomian masyarakat sekitarnya. Pengusaha yang nantinya menempati sebagian lahan reklamasi harus dibuatkan regulasi untuk memberdayakan masyarakat sekitar bukan justru menginjak nilai – nilai kemanusiaan masyarakat yang miskin apa lagi sampai digusur”<sup>23</sup>*

Dalam penelitian yang penulis lakukan terjadi penggusuran diatas lahan 10 Ha yang disana bertempat tinggal 45 KK dan mereka tidak memiliki tempat tinggal dan mata pencaharian lagi. Mereka menyampaikan hal tersebut ke DPRD namun tidak ada tanggapan yang berarti. Hal ini didukung oleh pernyataan anggota DPRD Kota Makassar Yeni Rahman, S.Si :

*“Proses reklamasi tidak serta merta dilaksanakan begitu saja ada 13 tahapan yang paling penting yang harus dilewati untuk melakukan reklamasi, jika salah satu saja tidak dipenuhi maka reklamasi tidak bisa di jalankan karen hal itu terkait satu sama lainnya. Utamanya harus memperhatikan masyarakat pesisir disekitarnya dan itu diatur undang – undang”<sup>24</sup>*

---

<sup>23</sup> Wawancara Basdir, SE. 21 Agustus 2015

<sup>24</sup> Wawancara Yeni Rahman, 21 Agustus 2015

Dari sejak awal Reklamasi ini di rencanakan tidak ada dari Partai Politik Di Kota Makassar yang tegas menolak reklamasi, mereka kesemuanya menerima saja reklamasi tersebut hanya beberapa dari anggota yang di luar rapat paripurna menyatakan tidak sepakat tetapi tetap juga menyetujui mereka hanya membangun citra di masyarakat agar tidak dikatakan tidak pro pada rakyat apa lagi mereka baru 1 periode dalam DPRD mereka membutuhkan dukungan dari masyarakat tentunya untuk periode berikutnya. Sedangkan secara terang – terangan Anggota DPRD lain menyatakan bahwa mereka sepakat dengan reklamasi yaitu William dari partai PDIP menyatakan :

*“Justru RTRW ini yang mengatur semua regulasi aturan - aturan bagaimana mengatur dan menata kota ini dengan benar. Justru jika perda ini tidak disahkan maka pembangunan akan kebablasan mereka akan membangun “se-enak perut” saja tanpa ada aturan yang mengikat dan mengindahkan dampak buruknya. Ada regulasi yang mengikat bahwa aturannya seperti ini ketika melakukan pembangunan semua ada aturannya. Sudah direkomendasikan bahwa reklamasi dilakukan oleh negara dan itu menjadi aset negara tidak bisa jadi aset pribadi, serta masyarakat disekitarnya diberdayakan misalnya hotel – hotel yang nantinya akan berada pada lahan tersebut harus memberdayakan masyarakat setempat”*.<sup>25</sup>

DPRD Kota Makassar berhak untuk menolak perda yang dianggap lebih banyak merugikan masyarakat namun mereka justru membenarkan bahwa Di Kota Makassar dengan aturan saja mereka melanggar apalagi tidak ada aturan yang mengatur. Lalu dimana fungsi lembaga – lembaga lain yang bertindak menindaki semua hal yang menyalahi aturan dan

---

<sup>25</sup> Wawancara William, 21 Agustus 2015



pada kenyataannya Di Kota Makassar kebijakan selalu berakhir pada menguntungkan pihak – pihak tertentu.

Melihat semua hal ini Walikota, Birokrat, DPRD, dan Penegak Hukum telah melakukan pembiaran, entah apa motif mereka dalam membiarkan namun hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pola perilaku penguasa di kota makassar dengan banyaknya pelanggaran maka hal tersebut tidak akan berhenti jika pemangku kekuasaan tidak melakukan fungsinya atau bahkan terlibat dalam tindakan melanggar hukum.

Pada tahun 2010 kegiatan reklamasi pantai sempat di lakukan oleh pengusaha lokal untuk membangun hotel yaitu Jen Tang yang menurut klaimnya wilayah yang berada puluhan meter dari Fort Rotterdam itu adalah milik dari keponakannya yaitu Agnes Ingrid B. Kurniawan. Mereka melakukan reklamasi berdasarkan SK Walikota No.590/78/Kep/XI/2010 dalam izin tersebut disebutkan bahwa pemberian izin diberikan kepada pemilik Agnes Ingrid untuk melakukan penimbunan atau reklamasi di pesisir pantai jalan unjungpandang. Namun reklamasi yang di keluarkan oleh Walikota Ilham Arif Sirajuddin pada saat itu sempat dihentikan karena menuai sorotan dari masyarakat karena justru pemerintah provinsi memerintahkan untuk mensterilkan pantai losari dari segala pembangunan komersil namun yang terjadi adalah terjadi pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di sekitar wilayah pantai losari.

Melihat keadaan tersebut maka wajar ketika reklamasi yang akan tercipta Di Kota Makassar ini mengalami permasalahan yang sama yaitu pembangunan yang terus menerus menyalahi aturan dimana pemerintah dalam hal ini justru mendukung atau bahkan terlibat pula dalam pelanggaran tersebut.

Melihat dari kebijakan dan pola perilaku lembaga eksekutif, Legislatif, dan yudikatif Di Kota Makassar Dimana proses tender proyek yang tidak transparan, proses perizinan yang tidak jelas, tidak adanya tindakan pengawasan dan pengadilan terhadap pelanggaran – pelanggaran dalam proses teknis kebijakan, maka penulis melihat bahwa adanya indikasi pertemuan kepentingan antara beberapa elit di kota makassar yang kesemuanya dari mereka mendapatkan keuntungan dalam perilaku mereka mengamankan kebijakan agar tetap sesuai dengan keinginan mereka.

Perilaku mereka yang bersama – sama dalam mengontrol suatu kebijakan meskipun latar belakang kepentingan mereka berbeda – beda maka penulis melihat berdasarkan konsep – konsep yang ada mereka membentuk suatu jaringan yang disebut kartel politik . Jaringan yang mereka bentuk tidak terbangun dari waktu yang singkat namun telah terbangun dari dalam Partai Politik, Hubungan Kekerabatan atau Relasi Usaha, serta hubungan pemimpin dan bawahan.

Dalam konsep kartel yang digambarkan Supriatma jaringan tersebut pada akhirnya akan menciptakan pengabaian kepada massa-rakyat

dimana mereka hanya menjadi bagian luar dari jaringan tersebut. Hal itu sejalan dengan Revitalisasi Lapangan Karebosi dimana rakyat kehilangan ruang publik dan dalam Reklamasi Pantai Losari masyarakat makassar digusur serta merasakan dampak lingkungan dari kegiatan reklamasi tersebut.

#### **B. Implikasi Kartel Terhadap Kekuasaan Walikota Di Kota Makassar**

Walikota sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi Di Kota Makassar tentunya mempunyai peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan anggaran daerah kota makassar sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Kebijakan yang dibuat oleh walikota harusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi atau jaringannya sehingga dapat tercapai *Good Governance* di suatu wilayah.

Mekanisme dalam pembangunan Kota Makassar harusnya sesuai dengan perundang – undangan. Pembuatan kebijakan pembangunan tidak bisa di campuri oleh pihak – pihak yang memanfaatkan kedekatan atau pengaruh eksternal. Namun dalam beberapa kasus di indonesia beberapa kepala daerah memanfaatkan wewenangnya untuk menciptakan *broker* dari jaringan – jaringan yang telah dibangunnya sehingga mampu memperkokoh kekuasaannya. Tentunya perilaku loyal dari jaringan mereka dalam konsep insentif politik mengharuskan walikota untuk memberikan “balas budi” kepada *brokernya*. Penulis mengidentifikasi bahwa di kota makassar tercipta sebuah jaringan dimana jaringan tersebut akan berimplikasi pada meningkatnya kekuatan politik ekonomi dari walikota.



Penelitian ini dalam proses mengidentifikasi implikasi kartel terhadap menguatnya kekuasaan walikota maka yang menjadi objek penelitian penulis adalah Ilham Arif Sirajuddin dan Muh. Ramdhan Pomanto. Ilham Arif Sirajuddin merupakan Walikota yang pernah menjabat dari tahun 2003-2008 periode pertama dan kemudian terpilih lagi menjadi Walikota pada periode kedua yaitu tahun 2008 sampai 2013 dan Walikota berikutnya adalah Muh. Ramdhan Pomanto yang terpilih pada tahun 2014 sampai sekarang. Penulis melihat bahwa Ilham Arif Sirajuddin dan Muh. Ramdhan Pomanto adalah pemimpin yang mampu mengakomodasi semua jaringan untuk memperkuat kekuasaannya.

- Ilham Arif Sirajuddin

Terpilihnya Ilham Arif Sirajuddin selama dua periode menunjukkan bahwa Ilham Arif Sirajuddin memiliki pengaruh yang kuat di kota Makassar. Keterpilihannya tidak terlepas dari peran partai politik maupun tim suksesnya. Ilham Arif Sirajuddin pada awalnya mengembangkan kekuatan politik dengan bergabung di Partai Golkar namun karena dalam prosesnya dia merasa tidak diakomodasi lagi oleh Partai Golkar dia kemudian pindah menjadi anggota partai Demokrat. Dalam laporan dana kampanye Ilham Arif Sirajuddin pada pemilihan Walikota tahun 2008 dia mampu mengumpulkan dana sebesar 3.725.925.223 dan tidak dibantu dari Partai Golkar Pada Saat itu yang terlihat dalam laporan dan kampanye tidak ada dana yang berasal dari partai kesemuanya berasal dari hibah dan dana pribadi.

Keterpilihan Ilham Arif Sirajuddin tidak terlepas dari Batu Putih Syndicate, mereka adalah tim pemenangan atau tim sukses darinya. Batu Putih Syndicate atau Gank batu putih yang di pimpin oleh Syamsul Bahri Sirajuddin atau Ancu yang merupakan kakak dari Ilham Arif Sirajuddin menjabat sebagai presiden sedangkan adik dari Ilham Arif Sirajuddin yaitu Hendra Sirajuddin sebagai *Campaign Center*. Selain itu anggota-anggota lain pun ikut kebanyakan dari mereka berlatar belakang keluarga, politisi, pengusaha, pegawai negeri, wartawan, tokoh agama dan lain – lain.

Dengan keterpilihan ilham selama dua periode ini menunjukkan bahwa tim pemenangan dari ilham telah mampu menjadi *broker* untuk Ilham Arif Sirajuddin. Dalam konsep insentif politik setiap individu maupun kelompok masyarakat cenderung melakukan suatu tindakan bila mana manfaatnya bertambah bagi mereka begitupun sebaliknya dan yang mampu memberikan insentif dalam konsep ini adalah mereka yang memiliki kekuasaan insentif dimana dia mampu memodifikasi perilaku dengan menggunakan imbalan sebagai faktor pengaruh. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa perilaku Gank Batu Putih yang sangat loyal tersebut karena mereka juga mendapatkan insentif dari Ilham Arif Sirajuddin.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Dalam penelitian yang dilakukang oleh Tranparancy international Indonesia dalam wawancaranya dengan narasumber menyatakan “*Gank Batu Putih saat ini sudah seperti pemerintahan bayangan Di Kota Makassar. Kebijakan – kebijakan IAS biasanya digodok terlebih dulu di Batu Putih , termasuk soal proyek – proyek di SKPD dan karena di Batu Putih itu juga banyak pebisnis yang bergabung, umumnya proyek – proyek jatuh ketangan pebisnis yang main disana*”. Dia mengambil contoh, “*biasanya ada pembagian kavling dalam proyek – proyek seperti*

Dalam gagasan Barbara Geddes terkait the political Uses of Bureaucracy bahwa kecenderungan penguasa secara terus menerus dalam memanfaatkan birokrasi di dasari oleh 4 alasan bahwa mereka mampu menjadi agen penyebar keuntungan, mesin politik yang loyal, sumber patronase dan penyempurna kebijakan. Di kota makassar hubungan Ilham dengan birokratnya terkenal sangat baik dan jika ada mereka yang kurang baik maka mereka akan di pecat dari posisinya.

Gank Batu Putih juga berpengaruh dalam penempatan posisi strategis di kota makassar dimana mereka yang menjadi tim sukses dari Ilham Arif Sirajuddin menjadi bagian dari Birokrasinya. Tentunya ketika Ilham Arif Sirajuddin menempatkan orang – orang kepercayaan mereka dalam posisi yang dekat dengan masyarakat seperti kepala dinas, camat, atau lurah maka mereka akan mampu membangun citra yang baik bagi Ilham Arif Sirajuddin.

Kasus yang melibatkan Ilham Arif Sirajuddin sehingga membawanya menjadi tersangka kasus korupsi yaitu dugaan korupsi dana PDAM tersebut juga dalam beberapa tulisan di media menunjukkan bahwa adik dari Ilham Arif Sirajuddin pun terlibat di dalamnya yaitu Abadi Sirajuddin yang juga merupakan pimpinan dari PT.Traya Tirta.

Memang sudah menjadi hal yang biasa di indonesia jika suatu pemimpin terpilih maka mereka akan menempatkan orang – orang

---

*ini. Proyek besar seperti karebosi atau pantai losari, itu lari ke teman – teman IAS kayak Bang Hasan atau Jentang. Sementara proyek kecil biasanya jadi makanan yang lain. Misalnya proyek paving block kota makassar ini”.*



kepercayaannya termasuk keluarga dalam posisi strategis karena dianggap bahwa mereka mampu mewakilinya dalam mengambil keputusan.

- Muh. Ramdhan Pomanto

Sebagai pemimpin baru di kota makassar muh. Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto telah banyak mendapat dukungan dari masyarakat dengan keterpilihannya. Keterpilihan Muh. Ramdhan Pomanto tidak terlepas dari peran Partai Demokrat dimana yang menjadi ketuanya adalah Ilham Arif Sirajuddin. dalam kepemimpinan Muh. Ramdhan Pomanto selama beberapa 1 tahun ini dia telah menciptakan kebijakan untuk mereklamasi pantai Di Kota Makassar.

Danny Pomanto tidak hanya mendapatkan dukungan partai tetapi ia juga mendapat dukungan dari aktor politik yaitu Ilham Arif Sirajuddin dengan di keluarkannya rekomendasi Partai Demokrat oleh Ilham untuk menjadikan Danny Pomanto sebagai calon dari Partai Demokrat dan pasangannya Syamsu Rizal dari Partai Bulan Bintang. Dari pernyataan mantan asisten satu dari Ilham Arif Sirajuddin dan Ketua KP3S saat ini Sittiara Kinang menyatakan :

*“Ibaratnya biar orang bisu pun bisa mengatakan bahwa keterpilhan pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal merupakan peran besar dari Ilham Arif Sirajuddin”.*<sup>27</sup>

Keterpilihan dari Danny Pomanto juga di dukung oleh tim suksesnya yaitu Gank Batu Putih dan Anak Lorongna Makassar. Danny Pomanto dianggap sebagai penerus dari Ilham Arif Sirajuddin maka dari

---

<sup>27</sup> Wawancara Sittiara Kinang, 18 Agustus 2015

itu bahkan tim pemenangan dari Ilham Arif Sirajuddin dulunya juga mendukung Danny Pomanto sesuai instruksi dari Ilham Arif Sirajuddin.

Jaringan – jaringan politik ini kemudian dijadikan broker oleh Danny Pomanto untuk mendulang suara untuk periode pertama dan periode berikutnya. Dalam periode berikutnya Danny Pomanto sangat membutuhkan peran dari birokrasinya maka dari itu untuk membangun citra di masyarakat untuk keterpilihannya berikutnya danny pomanto sangat bergantung pada birokrasinya. Dalam pernyataan Ibrahim sebagai bagian dari Bappeda Kota Makassar, Kasubid. Tata Ruang dan Bangunan Kota menyatakan :

*“Menjadi visi misi pemerintah kota makassar dan tujuan walikota dalam keinginan beliau 2 kali tambah baik mereka akan merasa lebih nyaman tinggal di makassar hidup di makassar , beraktifitas di makassar jadi indikator keberhasilan kepemimpinan bapak walikota, akan di lihat dari itu kalau masyarkat makassar akan merasa lebih nyaman lebih enak beraktifitas di kota makassar maka tentunya disitulah keberhasilan bapak walikota dan wakil walikota. Masalah berlanjut atau tidak tergantung dari masyarakat karena walikota dapat menjadi walikota itu karena pilihan masyarakat”.*<sup>28</sup>

Dalam teori pertukaran jaringan yang mengkombinasikan teori pertukaran sosial dan analisis jaringan determinasi kekuasaan dari satu posisi adalah didasarkan pada banyaknya ketergantungan seluruh struktur pada posisi itu. Jaringan – jaringan yang dimiliki oleh Danny Pomanto pada akhirnya akan memperkokok kekuasaannya dengan kekuatan – kekuatan yang dimilikinya tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan mampu terpilih lagi dalam periode berikutnya.

---

<sup>28</sup> Wawancara Ibrahim, 18 Agustus 2015

Penulis melihat bahwa salah satu mega proyek Reklamasi Pantai di kota makassar akan banyak membantu Danny Pomanto dalam mendulang suara dan dana dimana investor yang rata – rata merupakan pengusaha lokal dan dekat dengan Danny Pommanto karena beberapa mega proyek tersebut adalan rancangan dari Danny Pomanto akan semakin membantu Danny pomanto dalam pemilihan berikutnya dan tentunya itu tidak akan gratis sesuai dengan konsep insentif.

Birokrat – birokrati dari Danny Pomanto akan melakukan hal yang terbaik dalam posisinya agar dia tetap menjadi bagian dari Danny Pomanto. Seperti yang nyatakan oleh salah satu informan yaitu :

*“Penyusunan perencanaan pembangunan jadi sifatnya kita lebih ke dokumen perencanaannya jadi dimana itu sudah ada tahapan – tahapan perencanaan dalam pembangunan, yang di mulai dari awal menyusun RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dimana dalam RPJMD itu telah tertuang apa yang menjadi visi misi walikota terpilih visi dan misi dari walikota menjadi kebijakan dan program dan kegiatan yang tentunya menjadi arah pemerintah kota dalam menyusun rencana pemerintah 5 tahun kedepan dalam bentuk aturan daerah. kemudian SKPD mengatur rensra yang berisi visi dan misi skpd dalam mendukung program walikota mereka yang akan buat. Setelah rensra RKPD yang berlaku untuk 1 tahun anggaran di bappeda itu menjadi acuan untuk skpd sebagai renja dokumen perencanaan sehingga apa yang dilaksanakan SKPD sesuai target ada konsistensi antara pelaksanaan dan pembangunan dsitulah fungsinya bappeda untuk senantiasa melakukan pengendalian dan mengasistensi SKPD untuk melakukan sesuai”<sup>29</sup>*

Dengan membangun relasi yang baik dengan birokrat, Partai Politik, Aktor Poltik, dan pengusaha lokal maka segala harapan dari Danny Pomanto akan mudah terwujud. Jaringan akan memberikan

---

<sup>29</sup> Ibid, 18 Agustus 2015



kekuatan bagi kartelisasi keuasaan Danny Pomanto sebagai seorang Walikota.

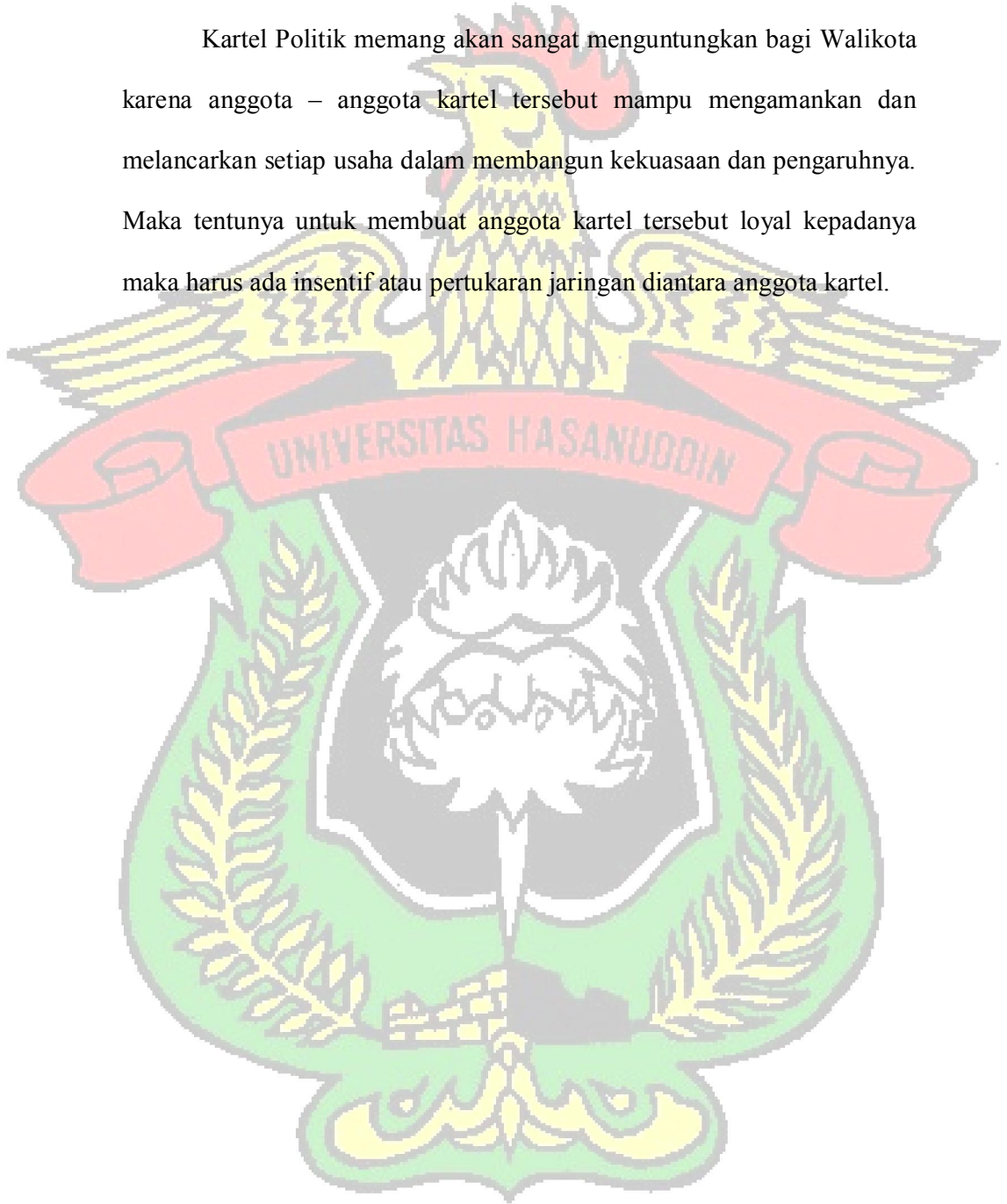
Dalam kartel politik yang menyatukan mereka hanyalah kepentingan. Selama mereka saling membutuhkan untuk pemenuhan kepentingan maka mereka akan terus bersama namun ketika salah satu dari yang lebih memiliki kuasa telah tidak lagi membutuhkan salah satunya maka mereka pun akan menciptakan penyingkiran. Demikian yang tercipta dengan Ilham Arif Sirajuddin ketika Danny Pomanto membutuhkannya dalam pemenangan sebagai Walikota Makassar maka Danny merapat kepadanya karena pada saat itu pengaruh Ilham Arif Sirajuddin sangatlah besar Di Kota Makassar namun setelah berbagai kasus yang Ilham Arif Sirajuddin Danny Pomanto pun merapat ke Syahrul Yasin Limpo.

Perda yang diajukan oleh Danny Pomanto banyak mendapatkan dukungan dari Partai Golkar. Ketua DPRD kota Makassar yang juga merupakan anggota partai golkar mendukung penuh kegiatan reklamasi begitupun kader Golkar yang lain. Syahrul Yasin Limpo selaku ketua DPP Partai Golkar pun ikut mendukung perencanaan perda utamanya terkait reklamasi karena dalam proyek CPI hanya dapat legal secara hukum ketika rancangan perda tata ruang terkait reklamasi dapat menjadi perda yang sah.

Tentunya akan sangat menguntungkan bagi Danny Pomanto ketika orang paling berpengaruh Di Sulawesi Selatan menjadi bagian yang mendukung pemerintahannya. Perusahaan Danny Pomanto pun akan

mendapatkan banyak insentif dengan posisinya sebagai konsultan reklamasi pantai Di Kota Makassar.

Kartel Politik memang akan sangat menguntungkan bagi Walikota karena anggota – anggota kartel tersebut mampu mengamankan dan melancarkan setiap usaha dalam membangun kekuasaan dan pengaruhnya. Maka tentunya untuk membuat anggota kartel tersebut loyal kepadanya maka harus ada insentif atau pertukaran jaringan diantara anggota kartel.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan meliputi beberapa hal berikut:

1. Kartel politik di kota makassar merupakan jaringan yang tercipta di kalangan elit yaitu politisi, birokrasi, partai politik, penegak hukum dan pengusaha. Elit ini bersama – sama menguasai dan mengendalikan kebijakan di kota makassar dengan mejadikan ruang publik di kuasai oleh beberapa pengusaha besar dan yang mendapat dampak buruk dari hal tersebut adalah masyarakat kota makassar.
2. Kartel politik yang tercipta di kota makassar berimplikasi pada menguatnya kekuasaan walikota karena semua jaringan tersebut mendapat insentif dari walikota sehingga mereka akan tetap bertahan dengan diakomodasinya kepentingan – kepentingan dari elit lainnya.

#### **B. Saran**

Sebagai akhir dari karya tulis ilmiah ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat dilaksanakan guna menjaga integritas pemimpin daerah dan kesejahteraan masyarakat kota makassar, yaitu: Sebaiknya kewajiban memperjuangkan kesejahteraan masyarakat kota makassar menjadi dasar pembenaran akuntabilitas yang bukan hanya terhadap konstituen, tetapi



akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab terhadap panggilan hidupnya, yaitu masuk ke politik karena di gerakkan oleh nilai, prinsip dan kepercayaan sehingga tidak terjadi tindak kolusif di tubuh pemerintah kota makassar.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ambardi, Kuskridho. *Mengungkap Politik Kartel : Studi Tentang Sistem Kepartaian Di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Haryanto, Sindung. *Sosiologi Ekonomi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.

Scruton, Roger. *Kamus Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 1992.

Widiyoko, J. Danang. *Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia : Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik*. Malang: Intrans Publishing. 2013.

### WEBSITE

<http://www.martinmanurung.blogspot.com/2010/07/membenahi-skema-insentif-politik.html>

[http://www.academia.edu/8173778/Politik\\_Kartel\\_di\\_Indonesia](http://www.academia.edu/8173778/Politik_Kartel_di_Indonesia)

<http://artikel-media.blogspot.com/2010/05/oligarki-plutokrasi-dan-kartel-politik.html>

<http://kartel-indonesia.blogspot.com/2013/02/politik-kartel-di-indonesia.html>

#### SUMBER LAIN

Boyer, Marcel, and Laffont, Jean-Jacques. *Toward A Political Theory Of The Emirgance Of Environmental Incentives Regulation*. The Rand Journal Of Economics, Spring 1999, 30, 1, ABI/INFORM GLOBAL.

D. Piotroski, Joseph, and T.J. Wang, and Zhang, Tianyu. *Political Incentives To Suppress Negative Financial Information : Evidence From State-Controlled Chinese Firms*. Standford University, The Chinese University of Hongkong, City University of Hongkong: 2008.

Ferras, Claudio, and Finan, Frederico. *Reelaction Incentives and Political Corruption : Evidence From Brazil's Municipal Audit Report*. University of California and IPEA, 2005.

Guevriero, Carmine. *The Political of Incentives Regulation: Theory and Evidence From Us State*. University of Cambridge : D73, H11, L51, K2, 2008.

Jurnal Mol Khan, Abdul Munir, dkk. *Jurnal: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Yogyakarta: FISIP UGM, 2007.



Jurnal Hajaroh, Mami. *Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi*. Yogyakarta : FIB UNY Program Studi Kebijakan Pendidikan, Bidang Keahlian Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

Ferraz, Claudio, and Finan, Frederico. *Motivating Politicians : The Impact of Monetary Incentives and Quality and Performance*. Massachusetts Avenue Cambridge: MA 02138 April 2009.

Kushandajani, dkk. Jurnal ilmu politik : POLITIKA. UNDIP : Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana, 2010.

Laffont, Jean-Jacques, and Martimort, David. *The Theory of Incentives I: The Principal-Agent Model*. 2001

Lembaga Survey Indonesia. *Insentif Politik Partai Oposisi : Pelajaran Dari Kasus Bank Century*. Jakarta: LSI, 2010

Raharjo D., Wasisto. *Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal*. Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, vol. 18, no.2, juli 2013: 203 – 231.

Tesis Hutabarat, Melvin Perjuangan. *Fenomena “Orang Kuat Lokal” Di Indonesia Era Desentralisasi : Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi*. Jakarta : UI FISIP, 2012.